

**KOMPARASI KINERJA KEUANGAN BUMDES DAN KUD
DI DESA BUKIT INTAN MAKMUR KECAMATAN KUNTO
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU DI PROVINSI
RIAU**

Oleh:

ARIYO KELANA

144210084

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian*



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Ariyo Kelana (144210084). Komparasi Kinerja Keuangan Bumdes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Di bawah bimbingan Bapak Bapak Khairizal, SP., M.MA.

Desa Bukit Intan Makmur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang masih terdapat BUMDes dan KUD yang masih beroperasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) profil usaha BUMDes dan KUD; (2) struktur dan perkembangan aset, hutang, modal, dan laba/SHU; (3) kinerja keuangan BUMDes dan KUD; (4) komparasi kinerja keuangan BUMDes dan KUD di Dsa Bukit Intan Makmur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau selama 5 bulan dari Bulan September 2019 – Januari 2020. Jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan BUMDes Usaha Makmur dan KUD Bukit Intan Makmur Tahun 2014-2018, serta beberapa data lainnya yang relevan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, rasio keuangan (rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas), serta uji t sampel independen (*t independent test*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BUMDes Usaha Makmur dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Desa, yang terdiri dari 1 orang direktur, 4 orang pengurus, dan 4 orang pengawas. Sedangkan KUD Bukit Intan Makmur dibentuk pada tahun 1994 berdasarkan SK Menkop & UKM, yang terdiri dari 3 orang pengurus, 3 orang pengawas, dan 6 orang karyawan, dengan jumlah anggota 315 orang. (2) Total aktiva (aset) BUMDes yaitu sebesar Rp. 3.850.559.195, hutang sebesar Rp. 2.202.340.017, modal (ekuitas) sebesar Rp. 1.648.219.178; dan laba sebesar Rp. 269.890.946. Pada KUD total aktiva (aset) yaitu sebesar Rp. 2.124.974.053, hutang sebesar Rp. 534.456.296, modal (ekuitas) sebesar Rp. 1.325.177.989, dan SHU sebesar Rp. 265.339.768. (3) Kinerja keuangan BUMDes pada tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa rasio cepat 182,63%, rasio kas 19,17%, DTER 108,51%, debt ratio 51,45%, NPM 36,83%, ROI 8,12%, ROE 16,70%, WCT 0,24 kali, dan FAT 3,31 kali. Sedangkan kinerja keuangan KUD pada tahun 2014-2018 menunjukkan rasio cepat 210,56%, rasio kas 63,57%, DTER 65,64%, debt ratio 38,79%, NPM 10,11%, ROI 9,90%, ROE 16,42%, WCT 0,56 kali, dan FAT 1,72 kali. Dimana secara keseluruhan kinerja KUD lebih baik dibandingkan BUMDes. (4) Secara statistik, dengan tingkat signifikansi 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan (nyata) pada rasio kas, DTER, debt ratio, NPM, WCT, dan FAT antara BUMDes dengan KUD.

Keyword: BUMDes, KUD, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Komparasi Kinerja Keuangan Bumdes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Riau.” Dalam Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah banyak memberikan pengorbanan baik moril maupun materil Terima kasih juga kepada Bapak Khairizal, SP., M.MA selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, sumbangan pikiran serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Karyawan Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Rekan-rekan seperjuangan agribisnis yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini, telah di upayakan sebaik mungkin, namun apabila terdapat kekurangan, saya mengharapkan masukan atau saran perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini agar bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA

PENGANTAR

i

DAFTAR

ISI

ii

DAFTAR

TABEL

v

DAFTAR

GAMBAR

vii

DAFTAR

LAMPIRAN

viii

BAB

I.

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar

Belakang

1



1.2. Perumusan	Masalah
5	
1.3. Tujuan dan Manfaat	Penelitian
6	
1.4. Ruang Lingkup	Penelitian
7	
BAB	
II.	TINJAUAN PUSTAKA
8	
2.1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
8	
2.1.1. Pengertian	BUMDes
8	
2.1.2. Landasan Hukum	BUMDes
11	
2.1.3. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes Serta Perannya	
12	
2.2. Koperasi	
13	
2.2.1. Pengertian	Koperasi
13	
2.2.2. Nilai-Nilai dan Prinsip	Koperasi
15	
2.2.3. Jenis	Koperasi
17	

2.3. Laporan		Keuangan
19		
2.3.1. Pengertian	Laporan	Keuangan
19		
2.3.2. Fungsi	Laporan	Keuangan
21		
2.3.3. Jenis	Laporan	Keuangan
23		
2.4. Kinerja		Keuangan
29		
2.4.1. Rasio		Likuiditas
32		
2.4.2. Rasio	Solvabilitas	(Leverage)
33		
2.4.3. Rasio	Rentabilitas/	Profitabilitas
34		
2.4.4. Rasio		Aktivitas
35		
2.5. Penelitian		Terdahulu
36		
2.6. Kerangka		Pemikiran
42		

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode, Tempat, dan Waktu
45

3.2. Jenis dan Sumber Data
45

3.3. Konsep Operasional
46

3.4. Analisis Data
48

3.4.1. Profil Usaha BUMDes dan KUD
49

3.4.2. Stuktur dan Perkembangan Usaha BUMDes dan KUD
49

3.4.3. Kinerja Keuangan BUMDes dan KUD
49

3.4.4. Perbandingan Kinerja BUMDes dan KUD
54

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
56

4.1. Keadaan Geografis dan Administratif
56

4.2. Keadaan Kependudukan
57

4.2.1. Umur
57

	4.2.2. Agama			
	58			
	4.3. Keadaan		Pendidikan	
	59			
	4.4. Mata	Pencaharian		Penduduk
	60			
	4.5. Keadaan			Pertanian
	62			
BAB	V.	HASIL	DAN	PEMBAHASAN
64				
	5.1. Profil	BUMDes	dan	KUD
	64			
	5.2. Struktur dan Perkembangan	Aktiva, Hutang, Modal, dan		
		Laba/SHU		
	66			
	5.2.1. Aktiva			(Aset)
	66			
	5.2.2. Hutang			(Liabilitas)
	69			
	5.2.3. Modal			(Ekuitas)
	71			
	5.2.4. Laba/	SHU	(Sisa Hasil Usaha)	
	73			
	5.3. Kinerja	Keuangan	BUMDes	dan KUD
	76			

5.3.1.	Rasio	Likuiditas
	76	
5.3.2.	Rasio	Solvabilitas
	79	
5.3.3.	Rasio	Rentabilitas
	82	
5.3.4.	Rasio	Aktivitas
	85	
5.4.	Perbandingan Kinerja Keuangan BUMDes dan KUD	
	88	
BAB	VI.	KESIMPULAN DAN SARAN
	90	
6.1.	Kesimpulan	
	90	
6.2.	Saran	
	91	
DAFTAR		PUSTAKA
	92	
LAMPIRAN		
	96	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan dan Pertumbuhan Laba Bersih BUMDes dan SHU KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.	4
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019.	57
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019.	58
4. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019	59
5. Jumlah Lembaga Pendidikan yang Ada Di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019	60
6. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019.	61
7. Luas Lahan Tanaman Perkebunan di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019	62
8. Jumlah Populasi Ternak di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019	

63			
9.	Profil BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.		
64			
10.	Struktur Akvita (Aset) pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.		
67			
11.	Stuktur Hutang (Liabilitas) pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.		
69			
12.	Struktur Modal (Ekuitas) pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.		
71			
13.	Pedapatan dan Laba/ SHU pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.		
74			
14.	Rekapitulasi Rasio Keuangan BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.		
76			
15.	Rasio Likuiditas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.		
77			
16.	Rasio Solvabilitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.		
80			

17. Rasio Rentabilitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

82

18. Rasio Aktivitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

85

19. Hasil Analisis Uji Komparasi Kinerja Keuangan BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

88



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian	44
2. Perkembangan Aktiva (Aset) BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.	68
3. Perkembangan Hutang (Liabilitas) BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.	71
4. Perkembangan Modal (Ekuitas) BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.	73
5. Perkembangan Laba/SHU BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Struktur Organisasi BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019.	96
2. Perkembangan dan Pertumbuhan Aktiva, Hutang, Modal, dan Laba/SHU pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018	98
3. Neraca (<i>Balance Sheet</i>) pada BUMDes Usaha Makmur, Tahun 2014-2018.	99
4. Laporan Rugi Laba (<i>Income Statement</i>) pada BUMDes Usaha Makmur, Tahun 2014-2018	100
5. Neraca (<i>Balance Sheet</i>) pada KUD Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018	101
6. Laporan Rugi Laba (<i>Income Statement</i>) pada KUD Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018	103
7. Hasil Analisis Uji Komparasi t Sampel Independen (<i>Independent Sample t Test</i>) Kinerja Keuangan BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.	104



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II. PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum memiliki beberapa tujuan penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Tujuan negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Satu Konsep tujuan negara yang tidak hanya sebagai negara formal untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan pula berkewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya merupakan konsep dari negara hukum modern yang disebut juga sebagai negara kesejahteraan, atau negara hukum materiil (*welfare state*) (Putra, 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui pembentukan badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Baik KUD maupun BUMDes, kedua lembaga tersebut sama-sama dibentuk untuk sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Hanya saja perbedaannya keduanya terletak pada prinsip pendirian dan sumber modalnya, yaitu KUD didirikan oleh kelompok masyarakat desa dan modalnya berasal dari anggota, sedangkan BUMDes didirikan oleh pemerintah desa dan modalnya berasal dari kekayaan desa (UU No. 6 Tahun 2014) (UU No. 25 Tahun 1992).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang, atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi melaksanakan dan mengembangkan usahanya demi mewujudkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi dapat memperoleh keuntungan (laba) guna menutup pembiayaan operasional usaha, misalnya gaji para karyawan, biaya kantor, biaya pergudangan, dan biaya-biaya lainnya, serta menghimpun dana cadangan untuk modal koperasi. Namun demikian, memperoleh laba yang sebesar-besarnya bukan merupakan tujuan utama koperasi, karena koperasi bukanlah lembaga yang bersifat *profit oriented*, melainkan memperoleh laba dalam jumlah yang wajar. Laba bagi koperasi disebut sebagai sisa hasil usaha.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

Hakekat BUMDes berbeda dengan hakekat koperasi sehingga BUMDes tidak bisa berbadan hukum koperasi. Pertama, BUMDes dibentuk dengan perbuatan hukum publik, yakni melalui Peraturan Desa yang disepakati dalam

musyawarah desa. Koperasi merupakan institusi hukum privat, yakni dibentuk oleh kumpulan orang per orang, yang semuanya berkedudukan setara sebagai anggota. Kedua, seperti halnya BUMN, modal BUMDes berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Koperasi berangkat dari simpanan pokok dan wajib dari anggota, yang kemudian juga membuka penyertaan modal dari pihak lain. Ketiga, BUMDes merupakan campuran antara pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi; koperasi merupakan institusi dan gerakan ekonomi rakyat. Keempat, BUMDes dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan mendayagunakan sumberdaya ekonomi lokal. Koperasi dibentuk untuk mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan anggota.

Desa Bukit Intan Makmur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang masih terdapat BUMDes dan KUD yang masih beroperasi hingga saat ini. BUMDes di desa tersebut didirikan pada tahun 2009 yang bergerak pada unit usaha simpan-pinjam, agen distribusi LPG 3 kg, kredit barang, jasa transfer, serta pembayaran token dan lain-lain. Sementara itu KUD didirikan pada tahun 1996 yang lebih bergerak pada unit usaha penampungan hasil produksi, simpan-pinjam, dan saprodi. Perbedaan dari unit usaha yang dijalankan membuat keberadaan kedua badan usaha tersebut akhirnya saling melengkapi dan tidak saling berkompetisi, sehingga tujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pedesaan dapat diwujudkan bersama. Adapun perkembangan laba atau sisa hasil usaha (SHU) BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan dan Pertumbuhan Laba Bersih BUMDes dan SHU KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.

Tahun	Laba Bersih BUMDes		SHU Sebelum Pajak KUD	
	Perkembangan (Rp/tahun)	Pertumbuhan (%)	Perkembangan (Rp/tahun)	Pertumbuhan (%)
2014	168.563.837	-	327.725.126	-
2015	215.994.559	28,14	221.374.242	(32,45)
2016	226.327.468	4,78	145.708.148	(34,18)
2017	244.340.399	7,96	115.139.558	(20,98)
2018	269.890.946	10,46	265.339.768	130,45

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes Usaha Makmur (2014-2018)
 Laporan Keuangan KUD Bukit Intan Makmur (2014-2018)

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan laba bersih yang dihasilkan BUMDes di Desa Bukit Intan Makmur pada tahun 2014-2018 cenderung mengalami kenaikan dengan persentase pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 28,14% dari Rp. 168.563.837 menjadi Rp. 215.994.559. Sementara itu, perkembangan sisa hasil usaha (SHU) KUD pada tahun 2015-2017 terus mengalami penurunan secara konstan yaitu sebesar -32,45%, -34,18%, dan -20,98%, hingga mencapai titik terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 115.139.558. Namun pada akhirnya pada tahun berikutnya yaitu 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp. 115.139.558 menjadi 265.339.768 atau dengan persentase perumbuhan sebesar 130,45%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUD telah berdiri lebih lama dibandingkan dengan BUMDes, namun nyatanya perkembangan usahanya justru semakin susut.

Dalam sejarahnya, tidak banyak BUMDes yang berhasil dibandingkan dengan koperasi unit desa (KUD), dan lebih banyak BUMDes mengalami kebangkrutan, akibat masih kentalnya budaya KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) oleh beberapa oknum pejabat. Kemampuan BUMDes di Desa Bukit Intan Makmur dalam bertahan tidak lepas dari kinerja finansialnya yang baik. Sebagai sesama lembaga usaha pedesaan yang dibangun melalui prakasa warga

untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga desa, maka keberadaan kedua lembaga tersebut perlu dipertahankan. Oleh karena itu, sangat penting sekiranya dilakukan analisa mengenai kinerja keuangan (finansial) pada kedua lembaga tersebut agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan finansialnya sehingga dapat menjadi bahan perumusan strategi dalam upaya peningkatan.

2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil usaha BUMDes dan KUD di desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana struktur dan perkembangan aset, hutang, modal, dan laba/SHU pada BUMDes dan KUD di desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana kinerja BUMDes dan KUD di desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?

2.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Profil usaha BUMDes dan KUD di desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
2. Struktur dan perkembangan aset, hutang, modal, dan laba/SHU pada BUMDes dan KUD di desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
3. Kinerja keuangan BUMDes dan KUD di desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
4. Komparasi kinerja BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dengan adanya sebuah penelitian, diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para peneliti sendiri maupun bagi yang lainnya.
2. Bagi BUMDes dan KUD, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Bukit Intan Makmur. Penelitian ini juga dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial.
3. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

2.4. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi cakupan/lingkupnya. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu adalah: Unit analisis dalam penelitian ini adalah BUMDes Usaha Makmur dan KUD Intan Makmur yang berada di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis: (1) profil BUMDes dan KUD, (2) struktur dan perkembangan aset, hutang, modal, dan laba/SHU; (3) Kinerja keuangan, dan (4) komparasi kinerja keuangan BUMDes dan KUD.

Jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan BUMDes Usaha Makmur dan KUD Bukit Intan Makmur Tahun 2014-2018, serta beberapa data lainnya yang relevan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada rasio likuiditas (meliputi: *quick ratio*, dan *cash ratio*); rasio solvabilitas (meliputi: rasio modal sendiri atas hutang/DTER dan rasio hutang/*debt ratio*); rasio rentabilitas (meliputi: NPM, ROI dan ROE); dan rasio aktivitas (meliputi: perputaran modal kerja/WCT dan perputaran aset tetap/FAT).

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3.1.1. Pengertian BUMDes

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and user-controlled*), transparansi, emansipatif, akuntable, dan *sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Diharapkan pembentukan BUMDes berangkat dari partisipatif dan inisiatif masyarakat desa, karena yang mengetahui secara pasti dan detil tentang semua potensi desa dan sumber daya desa adalah masyarakat itu sendiri. Prinsip emansipatif perlu dikedepankan karena dalam hal ini perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalangkemajuan desa. Bahkan potensi atau sumber daya yang dapat

dikembangkan bisa berasal dari pihak wanita. Misalnya industri rumah tangga yang berbasis pada pembuatan makanan, alat rumah tangga ataupun kerajinan tangan yang memiliki nilai jual.

Selain itu prinsip kebersamaan (*member base*) menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun sistem kerekatan antar anggota masyarakat, terutama dalam menjalankan usaha bersama. Dengan berusaha secara bersama-sama diharapkan akan membangkitkan kemandirian dalam diri masyarakat, sehingga tidak megarapkan lagi jenis-jenis bantuan dari pemerintah baik yang bersifat hibah ataupun pinjaman.

Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Badan Usaha Milik desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa. Ragam bentuk BUMDes disesuaikan dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

3.1.2. Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 213 ayat (1) berbunyi desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - a. Pasal 78 ayat (1) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Ayat (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
 - b. Pasal 79, Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Permodalan BUMDes dapat berasal dari: a) Pemerintah Desa; b) Tabungan masyarakat; c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/ Kota; d) Pinjaman; dan/atau e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat.

- c. Pasal 80, ayat (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

3.1.3. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes Serta Perannya

Menurut Purnomo (2004), adapun maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain: (1) menumbuhkembangkan perekonomian desa; (2) meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD); (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa; (4) sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain: (1) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah; (2) menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit desa; dalam unit-unit usaha desa; (3) menumbuhkembangkan sektor informal untuk usaha yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; (4) meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Menurut Seyadi (2003), adapun peranan BUMDes adalah sebagai berikut: (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan

sosialnya; berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya; berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

3.2. Koperasi

3.2.1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *Co* dan *Operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi diartikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha dan bertujuan untuk memepertinggi kesejahteraan para anggotanya (Anoraga, 1995).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian menjelaskan koperasi yaitu: Badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Buku Perundang-Undangan (2006), dalam UU No. 12 tahun 1967, pengertian koperasi adalah: Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan Hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Buku Perundang-Undangan (2006), dalam UU No. 25 tahun 1992, pengertian koperasi didefinisikan sebagai berikut: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Selain definisi koperasi menurut Undang-Undang, ada pandangan lain mengenai definisi koperasi yaitu menurut Soemarso (2005), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan Berbagai definisi koperasi menurut para ahli yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa apapun jenis koperasi yang didirikan di Indonesia, koperasi merupakan suatu wadah yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dengan tujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Asas kekeluargaan dalam hal ini menyiratkan bahwa semua anggota koperasi akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam perspektif Islam, pembentukan koperasi tergolong dalam *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan/ percampuran). Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua

atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha (Mardani, 2012). Allah SWT dalam al-Quran berfirman:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
والعَدْوَانِ ؕ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (berbuat) kebajikan dan taqwa, dan janganlah saling tolong menolong dalam (berbuat) dosa dan pelanggaran.” (Qs Al-Maidah [5]: 2)

Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang berkerjasama (bersekutu), dan menurunkan berkah pada pandangan mereka, dan apabila salah seorang yang berkerjasama (bersekutu) itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Sebagaimana termaktub dalam hadist sebagai berikut (Mardani, 2012):

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم
يخن أحدهما صاحبه فإذا خانهُ خرجت من بينهُما

“Dari Abu Hurairah, dia memarfukannya (menyandarkannya kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Maka jika ia (salah satunya) mengkhianatinya (teman yang lain), Aku keluar di antara keduanya." (HR. Abu Daud No. 3383 dan Al-Hakim No.2322).

3.2.2. Nilai-Nilai dan Prinsip Koperasi

Nilai koperasi menjadi salah satu instrumen yang diperlukan agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan serta landasan koperasi. Koperasi melandaskan nilai-nilai swadaya, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas (Baga, 2011):

1. Nilai Swadaya (menolong diri sendiri) didasarkan pada kepercayaan bahwa setiap orang mampu untuk berusaha keras demi nasibnya sendiri.
2. Nilai bertanggungjawab kepada diri sendiri berarti bahwa setiap anggota bertanggung jawab terhadap koperasi yang dijalankan agar tetap berdiri sendiri (*independent*) tanpa gangguan dari organisasi lain, publik maupun swasta.
3. Nilai demokrasi membedakan koperasi dengan organisasi/ unit usaha lainnya dimana setiap anggota memiliki hak untuk berpartisipasi, memperoleh informasi, didengar serta hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4. Nilai persamaan dan keadilan dimana setiap anggota harus diperlakukan sama dan adil tanpa ada perbedaan.
5. Nilai solidaritas menjamin bahwa koperasi dijalankan untuk kepentingan bersama bukan atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam UU No. 25 tahun 1992 bab III pasal 5 tertulis prinsip-prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela bermakna bahwa seseorang menjadi anggota tanpa unsur paksaan dan anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai syarat yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Terbuka bermakna bahwa keanggotaan tidak dibatasi diskriminasi apapun.
2. Pengelolaan organisasi secara demokratis. Prinsip ini menunjukkan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Prinsip ini menunjukkan

pembagian SHU tidak hanya berdasarkan modal yang dimiliki oleh anggota dalam koperasi, melainkan juga berdasarkan jasa usaha anggota koperasi.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa terhadap modal tidak didasarkan hanya sebatas modal yang diberikan anggota, harus wajar namun tidak melebihi suku bunga pasar.
5. Kemandirian. Prinsip ini bermakna bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain, selain itu koperasi memiliki tanggung jawab, otonomi, mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan.

3.2.3. Jenis Koperasi

Menurut Deputi Bidang PSDM Kementerian Koperasi dan UKM (2010), menyebutkan bahwa jenis koperasi terbagi lima, yaitu:

A. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

B. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya belisehingga pendapatan

riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Sebagai konsumen, anggota mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

C. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana tersebut menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

D. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

E. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

3.3. Laporan Keuangan

3.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Keuangan (2017), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Kasmir (2012), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).

Laporan keuangan dapat diibaratkan sebuah peta yang berguna bagi pihak-pihak yang sedang melakukan perjalanan. Dengan melihat pada peta yang ada, maka pihak yang sedang melakukan perjalanan tersebut dapat mencapai tujuan akhir dengan cara yang tepat dan tidak tersesat ditengah perjalanan. Pengguna dari laporan keuangan sendiri adalah manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan (Muhardi, 2013). Menurut APB *Statement* No. 4 (AICPA) dalam Harahap (2004) membagi tujuan laporan keuangan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan umum, yaitu menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima.
2. Tujuan khusus, yaitu memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), tujuan dibuatnya suatu laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi: keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka

dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

3.3.2. Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam satu periode dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu. Jika informasi di suatu laporan keuangan disajikan dengan benar, maka informasi tersebut sangat berguna untuk siapa saja yang akan mengambil keputusan. Adapun fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut (Harahap, 2011):

1. Bagi Pemilik perusahaan, yaitu untuk: (a) menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen, (b) mengetahui hasil dividen yang akan diterima, (c) menilai posisi keuangan dan pertumbuhannya, (d) mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham, (e) memperediksi kondisi perusahaan di masa datang, (f) mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi.
2. Bagi manajemen perusahaan, yaitu untuk: (a) sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik, (b) mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, atau segmen, (c) mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, atau segmen, (d) menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab, (e) menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya kebijaksanaan baru, (f) memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, AD (Anggaran Dasar), Pasar Modal, dan lembaga regulator lainnya.
3. Bagi investor, yaitu untuk: (a) menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, (b) menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan,

- (c) menilai kemungkinan divestasi (menarik investasi) dari perusahaan, (d) menjadi dasar prediksi kondisi perusahaan di masa datang.
4. Bagi kreditur atau bankir, yaitu untuk: (a) menilai kondisi keuangan dan hasil perusahaan, (b) menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan, (c) melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan, (d) menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit, (e) menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah disepakati.
 5. Bagi pemerintah dan regulator, yaitu untuk: (a) menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar, (b) sebagai dasar penetapan–penetapan kebijaksanaan baru, (c) menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain, (d) menilai perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan, (e) bagi lembaga pemerintah lainnya bisa menjadi bahan penyusun data dan statistik.
 6. Bagi analis, akademis, pusat data bisnis, laporan keuangan digunakan sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi.

3.3.3. Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal/ ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penjelasan lengkap mengenai 5 jenis laporan keuangan tersebut yaitu sebagai berikut:

A. Neraca (*Balanced Sheet*)

Neraca atau daftar neraca (*balanced sheet*) disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu dalam IFRS, neraca juga bisa disebut *statements of financial position*. Karena neraca merupakan potret atau gambaran keadaan pada suatu saat tertentu maka neraca merupakan *status report* bukan merupakan *flow report* (Harahap, 2009).

Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu neraca mempunyai tiga unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Aktiva (*Asset*)

Menurut Kasmir (2012), aktiva merupakan harta atau kekayaan (aset) yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu. Sedangkan menurut Martani (2012), aktiva (*asset*) adalah sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Kasmir (2012) mengelompokkan aktiva menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Aktiva lancar (*current asset*), merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun, misalnya kas, deposito berjangka, surat berharga, persediaan, piutang, persekot biaya, dan pendapatan yang masih diterima.

- b. Aktiva tetap (*fixed asset*), yaitu merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Aktiva tetap terbagi atas dua macam yaitu aktiva tetap yang berwujud (*tangible fixed asset*) dan aktiva tetap yang tidak berwujud (*intangible fixed asset*). Yang termasuk ke dalam aset tetap yang berwujud antara lain yaitu tanah, gedung, kendaraan, dan mesin serta peralatan. Sedangkan yang termasuk ke dalam aktiva tidak berwujud misalnya *patent*, *goodwill*, *royalty*, *copyright* (hak cipta), *tradename/ trademark* (merek/nama dagang), *franchise* dan *license* (lisensi).
- c. Aktiva lain-lain, yaitu investasi atau kekayaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Isi dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau investasi yang tidak bisa dikelompokkan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap.

2. Kewajiban/ Hutang (*Liability*)

Menurut Munawir (2014), kewajiban adalah semua hutang keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Kewajiban atau hutang keuangan perusahaan dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu:

- a. Hutang lancar atau hutang jangka pendek, yaitu kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, utang gaji dan upah, utang pajak, dan utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar.
- b. Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun

sejak tanggal neraca). Termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya utang obligasi, utang hipotik dan utang bank atau kredit investasi.

3. Modal (Ekuitas)

Modal (ekuitas), merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), modal (ekuitas) adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban/ hutang. Unsur ekuitas ini dapat disubklasifikasi lebih jauh menjadi dua, yaitu:

- a. Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham.
- b. Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk dividen (ditahan).

Di dalam neraca, masing-masing unsur tersebut disajikan dengan menganut ketentuan-ketentuan tertentu. Aktiva disajikan menurut urutan likuiditas, kewajiban menurut jatuh tempo, sedangkan ekuitas disajikan menurut kekekalan.

B. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Menurut Munawir (2014), laporan laba rugi adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan menurut Djarwanto (2001), laporan laba rugi memperlihatkan hasil yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dan ongkos yang timbul dalam proses pencapaian hasil tersebut. Laporan ini juga memperlihatkan adanya pendapatan bersih atau kerugian bersih sebagai hasil dari operasi perusahaan selama periode tertentu.

Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan (*matching concept*), yang disebut

juga konsep pengaitan atau pepadanan, antara pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba bersih (*net income* atau *net profit*). Jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut rugi bersih (*net loss*) (Reeves, Warren, dan Duchac, 2014).

Menurut Hanafi dan Halim (2014), ada tiga elemen pokok dalam laporan laba rugi yaitu:

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan didefinisikan sebagai aset masuk atau aset yang naik nilainya atau utang yang semakin berkurang atau kombinasi ketiga hal di muka, selama periode dimana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang atau memberikan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan.

2. Beban Operasional

Beban operasional bisa didefinisikan sebagai aset keluar atau pihak lain memanfaatkan aset perusahaan atau munculnya utang atau kombinasi antar ketiganya selama periode dimana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa atau melaksanakan aktivitas lainnya yang merupakan operasi pokok perusahaan.

3. Untung atau Rugi (*Gain or loss*).

Untung atau rugi didefinisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat insidental dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu, kecuali yang berasal dari pendapatan operasional dan investasi dari pemilik saham. Contoh sumber *gain* atau *loss* adalah transaksi kurs mata uang asing, naik atau turunnya nilai sumber daya atau utang pada waktu masih dimiliki

C. Laporan Perubahan Modal/ Ekuitas

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), menyatakan bahwa perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus iungkapkan dalam laporan keuangan. Menurut Sodikin dan Riyono (2014), Laporan perubahan modal adalah laporan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan modal/ ekuitas menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan modal yaitu meliputi: (a) jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini, (b) jumlah rupiah tiap jenis modal, (c) jumlah rupiah modal yang berubah, (d) sebab-sebab berubahnya modal, (e) jumlah rupiah modal sudah berubah.

D. Laporan Arus Kas (*Cash Flow*)

Menurut Soemarso (2005), laporan arus kas (*statement of cash flow*) pada dasarnya mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk melakukan kegiatan perusahaan serta penggunaannya selama suatu periode tertentu. Sedangkan menurut

Harahap (2004), laporan arus kas (*cash flows*) adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan: operasional, pembiayaan dan investasi. Laporan arus kas memperlihatkan bagaimana aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan mempengaruhi kas selama periode akuntansi. Laporan ini menjelaskan kenaikan atau penurunan kas bersih selama periode tersebut. Arus kas masuk (*cash inflow*) dan arus kas keluar (*cash outflow*) ada yang bersifat terus menerus dan ada yang bersifat tidak kontinyu (*intermitten*).

Ada 3 aktivitas dalam laporan arus kas (*cash flow*), yaitu sebagai berikut (Kieso dkk, 2012):

1. Aktivitas operasi (*operating activities*), meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih.
2. Aktivitas investasi (*investing activities*), meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik utang maupun ekuitas) serta property, pabrik, dan peralatan.
3. Aktivitas pendanaan (*financing activities*) melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi: (a) perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya; (b) Peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya.

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2012), laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (2007), menyatakan

bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen.

3.4. Kinerja Keuangan

Keberhasilan suatu industri dalam menjalankan bisnisnya dapat dilihat dari kinerja industri tersebut. Kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam suatu industri. Hal ini karena dengan kinerja yang baik maka dapat diketahui apakah industri menggunakan dan mengelola sumber dayanya dengan baik dan optimal. Menurut Ivancevich (2008) dalam Noor (2013), kinerja didefinisikan sebagai kontribusi individu baik positif maupun negatif yang diberikan individu pada organisasinya.

Sucipto (2003) mendefinisikan kinerja sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Noor (2013), dalam pengelolaan kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif antara pegawai, pemimpin, dan organisasi, melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, standar, dan kompetensi yang disetujui bersama.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), definisi kinerja keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Sedangkan kinerja keuangan menurut Fahmi (2013), Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja

keuangan berfokus pada aspek-aspek keuangan dilihat dari tingkat penjualan dan laba yang dihasilkan oleh industri. Informasi mengenai kinerja keuangan tersedia dalam laporan keuangan, namun tidak mudah mengetahui kinerja keuangan secara langsung. Kinerja keuangan dapat diketahui menggunakan alat pengukuran keuangan dengan rasio keuangan.

Menurut Munawir (2014), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein (1983) dalam Harahap (2011) adalah sebagai berikut:

1. *Screening*. Mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.
2. *Understanding*. Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya.
3. *Forecasting*. Meramalkan kondisi keuangan di masa yang akan datang.
4. *Diagnosis*. Melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation*. Menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dalam suatu laporan keuangan (*Financial Statement*). Menurut Kasmir (2012), rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antara

komponen yang ada diantara laporan keuangan. Ada beberapa rasio dalam rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu seperti rasio likuiditas, solvabilitas (*leverage*), profitabilitas/rentabilitas, aktivitas, efektivitas, pertumbuhan, *market based* (penilaian pasar), dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini terbatas hanya menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas (*leverage*), profitabilitas/rentabilitas, dan aktivitas.

3.4.1. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2012), rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut Munawir (2014), rasio likuiditas yaitu rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi suatu kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan dalam keadaan “likuid”.

Adapun beberapa tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari rasio likuiditas menurut Kasmir (2012) adalah:

1. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar

kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).

2. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
6. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
7. Melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
8. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) terdiri atas berbagai indikator yang umumnya digunakan yaitu meliputi rasio lancar (*current ratio*), rasio sangat lancar

(*quick ratio* atau *acid test ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan perputaran kas (*cash turnover*).

3.4.2. Rasio Solvabilitas (*Leverage*)

Menurut Kasmir (2012), rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luar dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Menurut Kasmir (2012) beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas adalah: (1) untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); (2) untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; (3) untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; (4) untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Sementara itu manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah: (1) untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya; (2) untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; (3) untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; (4) untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio menurut Kasmir (2012), yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain: total utang dibandingkan dengan total aktiva

atau utang (*debt ratio*), jumlah kali perolehan bunga (*times interest earned*), lingkup biaya tetap (*fixed charge coverage*), lingkup arus kas (*cash flow coverage*)

3.4.3. Rasio Rentabilitas/ Profitabilitas

Menurut Munawir (2014), rasio profitabilitas atau rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Sedangkan menurut Gitman (2003), profitabilitas adalah hubungan antara pendapatn baik lancar maupun tidak lancar pada aktivitas yang produktif. Seperti rasio-rasio yang lain, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik perusahaan atau manajemen saja, tetapi juga pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat dari rasio ini adalah (Kasmir, 2012):

1. Mengukur laba yang dihasilkan dan mengetahui besarnya tingkat laba.
2. Menilai dan mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Menilai dan mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) terdiri atas berbagai indikator meliputi margin laba penjualan (*profit margin on sales*), daya laba dasar (*basic earning power*), hasil pengembalian total aktiva (*return on total asset*), hasil pengembalian ekuitas (*return on total equity*), dan lain-lain.

3.4.4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (*activity ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir, 2012).

Adapun tujuan perhitungan rasio aktivitas menurut Kasmir (2012) adalah sebagai berikut: (1) untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode; (2) untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (*days of receivable*), dimana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih; (3) untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang; (4) untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan (*working capital turnover*); (5) untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam suatu periode; (6) untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan.

Rasio aktivitas (*activity ratio*) yang umumnya digunakan perusahaan yaitu meliputi perputaran sediaan (*inventory turnover*), rata-rata jangka waktu penagihan/perputaran piutang (*average collection period*), perputaran aktiva tetap (*fixed asset turnover*), perputaran total aktiva (*total asset turnover*).

3.5. Penelitian Terdahulu

Akbar (2009), telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan dan Aktivitas Usaha KUD Sumber Alam dan Primkopti (Studi Kasus: KUD Sumber Alam dan Primkopti Kabupaten di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis: (1) perkembangan usaha KUD Sumber Alam dan Primkopti, (2) kinerja keuangan KUD Sumber Alam dan

Primkopti. Tempat penelitian dipilih secara *purposive* (sengaja), yaitu di KUD Sumber Alam dan Primkopti yang ada di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ni yaitu analisis trend dan rasio keuangan (rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas).

Hasil penelitian menunjukkan: (1) KUD Sumber Alam: trend pada pos aktiva lancar memperlihatkan trend yang cenderung meningkat, aktiva tetap cenderung menunjukkan konstan atau tidak mengalami perubahan karena selama empat tahun terakhir, trend kewajiban lancar menunjukkan penurunan, pos penjualan barang dan jasa menunjukkan trend yang menurun. Sedangkan pada Primkopti: trend pada pos aktiva lancar memperlihatkan trend yang cenderung menurun, aktiva tetap yang berbentuk tanah mengalami penurunan yang konstan, kewajiban lancar menunjukkan peningkatan, pos penjualan barang dan jasa menunjukkan trend yang menurun. (2) Kinerja keuangan KUD Sumber Alam dilihat dari sisi analisis trend dan analisis rasio mengindikasikan kurang baik karena hasil perhitungan secara keseluruhan dibawah standar minimum. Sedangkan kinerja keuangan Primkopti secara keseluruhan sangat kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi rasio solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas usaha menunjukkan nilai yang sangat rendah, bahkan nilai rasio rentabilitas yang dimiliki Primkopti sangat buruk.

Rahayu (2014), telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan pada KUD Sumber Makmur Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada KUD Sumber Makmur. Metode peneltian ini menggunakan metode survey, yang berlokasi di Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Makmur Kecamatan Tanjung

Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas (menggunakan *current ratio*), rasio solvabilitas (*debt to total asset, equity to debt*), rasio rentabilitas (*return on equity* dan profitabilitas).

Hasil penelitian menunjukkan: Rasio likuiditas berada di bawah 275%, sehingga dinyatakan dalam klasifikasi yang tidak likuid. Rasio solvabilitas (*debt to total asset*) berada di bawah 130% sehingga dinyatakan dalam kondisi yang baik. Rasio Modal sendiri terhadap hutang berada di bawah 15%. Oleh karena itu, dinyatakan dalam klasifikasi yang kurang baik. Hasil perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri berada di atas 10%-20%, maka dinyatakan baik. Walaupun mengalami fluktuasi tetapi angka rasio profitabilitas berada di 1% sampai 9%, maka dinyatakan dalam klasifikasi yang kurang baik.

Mudjiyanti dan Rachmawati (2014), telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Syariah di Purwokerto Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa koperasi syariah memiliki kinerja yang baik. Untuk mengukur kinerja koperasi syariah digunakan alat rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Sampel di ambil dari koperasi syariah yang ada di Purwokerto Barat. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang di ukur dengan menggunakan *current ratio* dan *cash ratio* menunjukkan angka yang kurang baik karena tidak melibatkan akun piutang. Rasio solvabilitas koperasi syariah juga masih menunjukkan angka yang kurang baik, hal ini koperasi masih menunjukkan kinerja yang kurang *solvable* atau belum memberikan kontribusi

yang cukup dalam pengelolaan assets terhadap total hutang. Rasio rentabilitas menunjukkan angka yang cukup baik. Modal yang dimiliki kopererasi cukup rentable dalam menghasilkan sisa hasil usaha.

Tumarjiyanto dan Salman (2014), telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Koperasi: Studi Kasus pada KUD Manunggal Abadi di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dengan tujuan yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan KUD yaitu rasio: rentabilitas, solvabilitas, likuiditas dan efektivitas KUD Manunggal. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang mana dipilih secara sengaja (*purposive*) sebagai objek penelitian yaitu KUD Manunggal Abadi di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Analisis data yang digunakan yaitu alat rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, dan efektivitas.

Hasil peneltian menunjukkan bahwa: (1) Rasio Rentabilitas: rasio pendapatan bersih atas penjualan KUD mampu mengurangi biaya operasinya; rasio laba bersih terhadap kekayaan, menunjukkan kemampuan KUD dalam mengelola modal yang diinvestasikan dalam seluruh aktiva untuk menghasilkan keuntungan kurang baik dari tahun ke tahun, kemampuan modal sendiri menghasilkan keuntungan menunjukkan bahwa modal yang dimiliki koperasi tidak cukup rentabel dalam menghasilkan kekayaan bersih. (2) Demikian juga dengan rasio solvabilitas; rasio total hutang dengan modal sendiri menunjukkan bahwa kinerja keuangan KUD kurang solvabel dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, rasio total hutang dengan modal sendiri dan total hutang dengan total harta KUD tidak mampu menjamin keamanan bagi kreditur jangka panjang. (3) Pada rasio likuiditas

berada pada kondisi likuid, dari perkembangan selama 5 tahun yang menunjukkan angka yang cukup stabil dimana angka yang dihasilkan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu signifikan dan berada pada kondisi likuiditas baik yaitu dengan kemampuan untuk membayar kewajiban lancar. (4) Sementara itu, rasio efektifitas KUD Manunggal Abadi masih baik, dimana rasio harga pokok penjualan atas penjualan, harga pokok penjualan, dan beban operasi atas penjualan cukup baik.

Hasim (2018), telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan dan Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Dengan tujuan yaitu untuk menganalisis: (1) karakteristik pengurus, karyawan, dan anggota; (2) kinerja keuangan di tinjau dari analisis rasio keuangan; (3) merumuskan pengembangan usaha KUD Sejahtera. Metode yang digunakan adalah metode survei, sampel diambil sebanyak 52 orang (pengurus, karyawan, dan anggota) dipilih secara acak sederhana (*simple random sampling*). Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) karakteristik umur pengurus, 54 tahun, karyawan 41 tahun, dan anggota 53 tahun; jenis kelamin didominasi oleh laki-laki; tingkat pendidikan rata-rata pengurus, karyawan adalah SMA, dan anggota adalah SMP; pengalaman berusaha pengurus 13 tahun, karyawan 7 tahun, dan anggota 10 tahun, yang menunjukkan bahwa pengalamannya tergolong tinggi; rata-rata tanggungan keluarga pengurus, karyawan yaitu 3 orang sedangkan anggota yaitu 4 orang. (2) Dilihat dari rasio likuiditas, rata-rata *current ratio* 142,54%, *quick ratio* 126,32%, dan *cash ratio* 78,08%; rasio solvabilitas: rata-rata nilai *total debt to equity ratio* 26,88% dan *total debt to total capital ratio* 8,55%; rasio rentabilitas

rata-rata nilai *return of investment* (ROI) 31,73%, *return of equity* (ROE) 83,20%; rasio aktivitas rata-rata nilai *inventory turnover* 28,81 kali, *fixed assets turnover* 36,28 kali, *total assets turnover* 2,79 kali, *receivable turnover* 4,53 kali. (3) strategi yang akan ditetapkan yaitu: a) mengikut sertakan pengurus yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah ke dalam kegiatan pelatihan guna memperbaiki tara cara pengelolaan KUD; b) meningkatkan kualitas pengurus dengan merekrut pengurus baru yang mempunyai tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang baik; b) melakukan rapat anggota dan pengurus untuk membuat visi dan misi yang lebih lebih terencanakan, memperbaiki sistem administrasi untk membuat sistem pembukuan yang terstruktur.

Rozi (2018), telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan dan Manfaat Ekonomi Langsung Koperasi Usaha Maju di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis: (1) karakteristik pengurus dan anggota koperasi, (2) kinerja keuangan koperasi, (3) Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) Koperasi Usaha Maju. Penelitian ini menggunakan metode survey, yang dilaksanakan di Koperasi Usaha maju di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Responden pengurus dipilih secara sensus sebanyak 3 orang, sedangkan responden karyawan dan anggota koperasi dipilih secara *simple random sampling* (acak sederhana) yaitu masing-masing sebanyak 5 orang dan 33 orang. Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Karakteristi Pengurus, Karyawan dan Anggota koperasi umur pengurus rata-rata umur 45,33 tahun dan anggota rata-rata

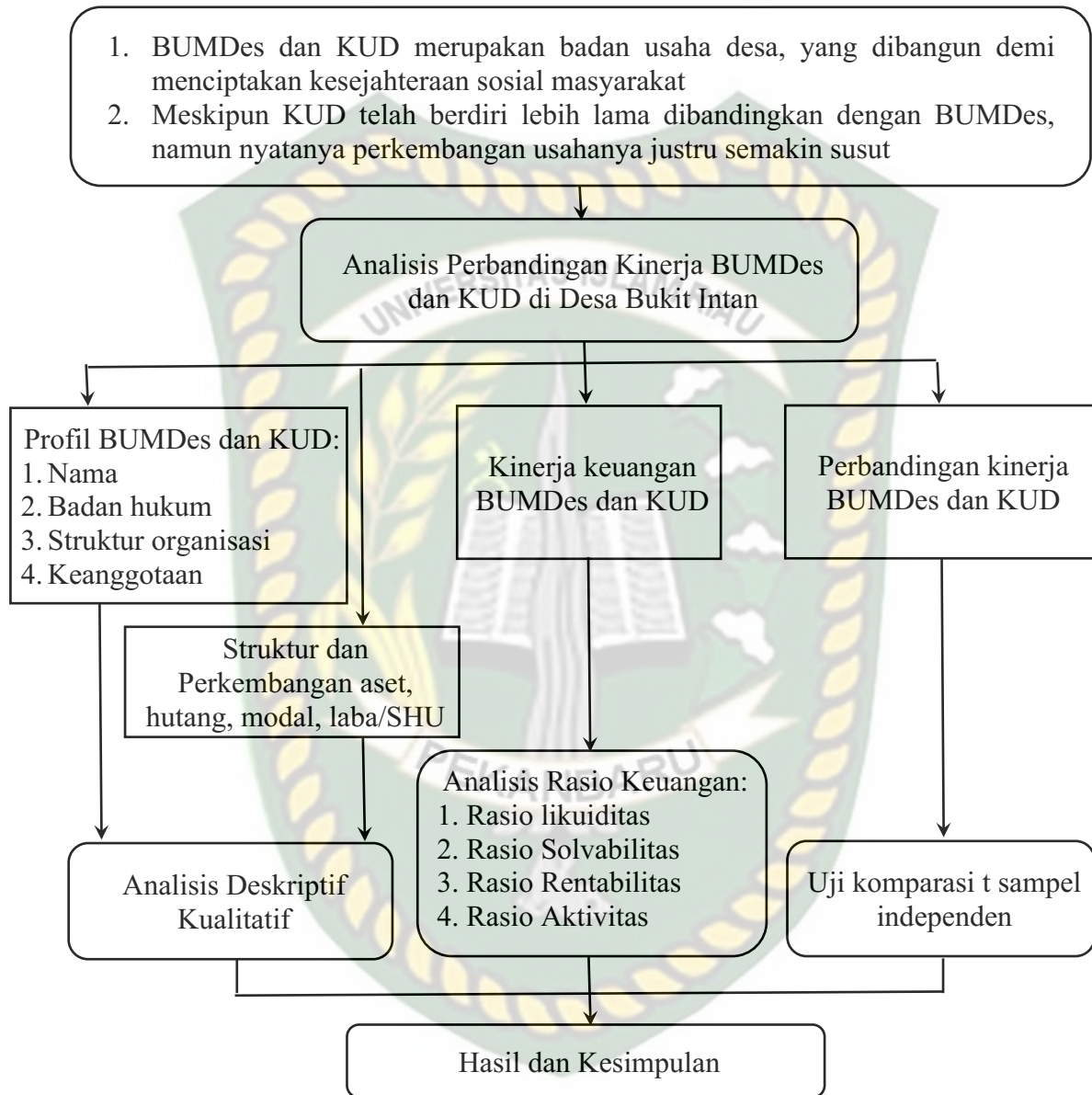
54,16 tahun pendidikan terbanyak adalah 12,00 (SMA) tahun dan anggota adalah 7,41 (SD) tahun. Lama bekerja Koperasi rata-rata 16,00 tahun dan anggota 13,44 tahun. Jumlah tanggungan keluarga pengurus rata-rata 4,00 orang dan anggota 4 orang. (2) Rasio likuiditas: *curent ratio* adalah sebesar 361,95%, rata-rata nilai *quick ratio* 348,98% dan rata-rata *cash ratio* 20,55. Rasio Rentabilitas ekonomi: ROI adalah sebesar 1,77 dan ROE sebesar 11,77. Rasio Solvabilitas: nilai *total dept to equity ratio* sebesar 207,38% dan *total dept to capital asset ratio* sebesar 30,43%. Rasio Aktifitas: rata-rata nilai *inventory turnover* sebesar 239,89 %, rata-rata *fixed assets turnover* sebesar 53,98, rata-rata nilai *rasio total asset turnover* 5,57 kali, dan nilai *rasio recievable turnover* sebesar 2,33 kali. Rasio efektivitas: rata-rata nilai rasio HPP atas penjualan sebesar 94,26% dan rata-rata nilai rasio HPP dan beban operasi sebesar 114,82%. (3) Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) pada harga TBS dan harga pupuk menunjukkan nilai yang positif dan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016-2017, sedangkan MEL pada suku bunga justru menunjukkan nilai yang negatif dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016-2017. Perbandingan nilai total MEL dengan SHU menunjukkan bahwa total manfaat ekonomi langsung yang diterima anggota koperasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SHU yang diterima anggota koperasi.

3.6. Kerangka Pemikiran

Desa Bukit Intan Makmur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang masih terdapat BUMDes dan KUD yang masih beroperasi hingga saat ini. BUMDes di desa tersebut bergerak pada unit usaha simpan-pinjam, kredit barang, jasa transfer, serta pembayaran token dan lain-lain. Sementara itu KUD lebih bergerak pada unit

usaha penampungan hasil produksi, simpan-pinjam, dan saprodi. Sehingga keberadaan kedua badan usaha tersebut saling melengkapi dan tidak saling berkompetisi. Meskipun KUD telah berdiri lebih lama dibandingkan dengan BUMDes, namun nyatanya perkembangan usahanya justru semakin susut. Baru sedikit BUMDes yang berhasil, dan lebih banyak BUMDes yang mengalami kebangkrutan akibat masih kentalnya budaya KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) oleh beberapa oknum pejabat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) profil usaha BUMDes dan KUD yang meliputi nama, badan hukum, struktur organisasi, dan keanggotaan; (2) Struktur dan perkembangan aset, kewajiban/ hutang, modal, dan laba/SHU; (2) kinerja keuangan BUMDes dan KUD; dan (3) perbandingan kinerja keuangan BUMDes dan KUD yang ada di Desa Bukit Intan Makmur. Keempat tujuan penelitian tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, rasio keuangan (rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas), serta uji t sampel independen (*t independent test*). Hasil dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan, sehingga dapat diketahui perbandingan kinerja antara kedua badan usaha tersebut mana yang lebih baik dan apakah ada perbedaan secara statistik. Adapun skema kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB IV. METODE PENELITIAN

4.1. Metode, Tempat, dan Waktu

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Penetapan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), dengan pertimbangan bahwa di Desa Bukit Intan Makmur memiliki BUMDes dan KUD yang masih berjalan dengan baik hingga ketika penelitian ini dilaksanakan. BUMDes dan KUD tersebut yaitu bernama BUMDes Usaha Makmur dan KUD Intan Makmur.

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan mulai bulan September 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020, yang terdiri dari kegiatan persiapan (pembuatan proposal, seminar dan perbaikan), Pelaksanaan (pengumpulan data, tabulasi data dan analisis data) dan perumusan hasil (draf laporan, seminar, perbaikan, dan perbanyak skripsi).

4.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data tersebut diperoleh dari pengurus KUD dan BUMDes, berupa Laporan Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Kekayaan Bersih, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun 2018. Serta berbagai publikasi, laporan, riset dari berbagai lembaga terkait seperti BPS, Kementrian Koperasi & UMKM, dan lain-lain.

4.3. Konsep Operasional

Konsep Operasional mencakup pengertian yang diperlukan dalam mendapatkan data sampel untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian:

1. BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Kinerja Keuangan adalah suatu tampilan tentang kondisi keuangan lain yang bersifat sebagai penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada.
4. Neraca adalah laporan yang memuat posisi keuangan perusahaan yang menggambarkan keseimbangan nilai aktiva (aset) dengan hutang (liabilitas) dan ekuitas (modal).
5. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap (Rp)
6. Aktiva Lancar adalah aset atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun (Rp).
7. Kas adalah sejumlah uang tunai (berbentuk kertas maupun logam) yang disimpan untuk pembiayaan keperluan operasional perusahaan (Rp).
8. Bank adalah sejumlah uang yang di simpan ke dalam rekening bank (Rp)

9. Piutang Usaha adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran uang dengan jumlah tertentu dari pihak yang berkewajiban membayar (Rp).
10. Persediaan adalah semua barang-barang dagang yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual (Rp).
11. Aktiva Tetap adalah aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, berupa nilai buku tanah, gedung, alat dan mesin (Rp)
12. Nilai buku tanah, gedung, alat, dan mesin adalah nilai perolehan dari tanah, gedung, alat, dan mesin yang dimiliki perusahaan yang dikurangi dengan nilai penyusutannya (depresiasi) (Rp).
13. Penyusutan (depresiasi) adalah penurunan nilai suatu aset setelah digunakan selama masa ekonomis manfaat aset tersebut (Rp).
14. Hutang (liabilitas) adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan (dapat berupa uang maupun barang/jasa), yang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang (Rp).
15. Hutang Lancar adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan/ dilunasi selama kurun waktu kurang dari 1 tahun (Rp).
16. Hutang Jangka Panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan/ dilunasi selama kurun waktu lebih dari 1 tahun (Rp).
17. Modal adalah selisih antar jumlah aktiva (aset) dan jumlah kewajiban (liabilitas) yang dimiliki perusahaan (Rp)
18. Laporan Laba Rugi adalah suatu laporan yang menyatakan pendapatan, biaya, beban, dan lagi/rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode 1 tahun (Rp).

19. Penjualan atau pendapatan adalah nilai keseluruhan barang/jasa yang terjual selama periode 1 tahun (Rp)
20. Harga Pokok Penjualan (HPP) atau Beban Pokok adalah total biaya langsung yang timbul akibat dari penjualan barang/jasa (Rp).
21. Laba adalah sisa penjualan (pendapatan) usaha BUMDes setelah dikurangi dengan biaya dan beban-beban (Rp).
22. SHU adalah sisa penjualan (pendapatan) usaha KUD setelah dikurangi dengan biaya dan beban-beban (Rp).
23. Rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
24. Rasio Solvabilitas yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut.
25. Rasio Rentabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.
26. Rasio Aktivitas adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi/efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivitya.

4.4. Analisis Data

Untuk dapat menjawab berbagai tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperlukan alat analisis yang tepat guna. Adapun alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.4.1. Profil Usaha BUMDes dan KUD

Profil usaha BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan/mendeskrripsikan profil usaha BUMDes dan KUD meliputi nama, badan hukum, struktur organisasi, dan keanggotaan. Disajikan ke dalam bentuk tabel yang kemudian dinarasikan dan diinterpretasikan.

4.4.2. Struktur dan Perkembangan Usaha BUMDes dan KUD

Struktur dan perkembangan usaha BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan/ mendeskripsikan struktur dan perkembangan aset, hutang, modal, dan laba/SHU yang dimiliki oleh BUMDes dan KUD selama 5 tahun belakang (2014-2018).

4.4.3. Kinerja Keuangan BUMDes dan KUD

Pengukuran kinerja keuangan BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan berdasarkan kriteria likuiditas, solvabilitas (*leverage*), rentabilitas/profitabilitas, dan aktivitas.

3.5.2.1. Rasio likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu Koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Munawir, 2014). Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat lancar atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau

membayar kewajiban/hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Standar minimal *quick ratio* yang baik adalah 150% (Kasmir, 2012). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

b. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas atau (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya (Kasmir, 2012). Menurut Suwandi (2005), standar untuk nilai *cash ratio* suatu perusahaan adalah 50%-70%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} - \text{Bank (Simpanan Jangka Pendek)}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

3.5.2.2. Rasio Solvabilitas (*Leverage*)

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi (Harahap, 2011). Sedangkan menurut Munawir (2014), solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun

kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Rasio Modal Sendiri atas Hutang (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal yang dimiliki perusahaan cepat menutupi kewajiban-kewajiban kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik, karena kemampuan modal sendiri dalam menjamin semua hutangnya akan semakin lebih besar. Standar yang baik untuk rasio ini adalah 90%. *Debt to Equity Ratio* (DTER) dapat dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2012):

$$DTER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

b. Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (*Debt Ratio*)

Debt to Asset Ratio (*Debt Ratio*) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin kecil rasionya maka kemampuan perusahaan semakin baik. Standar yang baik untuk rasio ini minimal adalah 35% (Kasmir, 2012). Menurut Harahap (2011) rasio ini dihitung dengan rumus:

$$Debt Ratio = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

3.5.2.3. Rasio Rentabilitas/ Profitabilitas

Rasio rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan rasio kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2014). Rasio rentabilitas/profitabilitas diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

a. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) atau margin Laba Bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan (Kasmir, 2012). Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Menurut Harahap (2011), semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba semakin baik. NPM dapat dirumuskan sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2014):

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak \& Bunga}}{\text{Pendapatan Kotor}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Adapun standar penilaian NPM dalam penelitian ini menggunakan acuan suku bunga Bank Indonesia *7 Days Reverse Repo Rate* (7-DRRR) per tanggal 20 Desember 2018 yaitu sebesar 6,00%, dimana apabila $\text{NPM} \geq 6\%$, maka dikatakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan tergolong baik, dan berlaku sebaliknya.

b. *Return on Investment* (ROI)

Return On Investment (ROI) disebut juga *Return On Total Asset* (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu (Hanafi, 2004). Menurut Kasmir (2012), standar ROI minimal pada suatu perusahaan adalah 30%. *Return on Investment* (ROI) dapat dirumuskan sebagai berikut (Sutrisno, 2009):

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak \& Bunga}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots (7)$$

c. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Bringham dan Houston (2004), *Return on Equity* (ROE) adalah rasio dari pendapatan bersih (yang telah dikurangi pajak dan bunga) yang dapat mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. ROE dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas modal sendiri, sehingga ROE disebut juga sebagai rentabilitas modal sendiri. Menurut Kasmir (2012), standar ROE minimal pada suatu perusahaan adalah 40%. *Return on Equity* (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut (Sutrisno, 2009):

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak \& Bunga}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

3.5.2.4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (*activity ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir, 2012). Rasio aktivitas diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turnover*)

Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turnover*) merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode. Standar yang digunakan untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali (Kasmir, 2012). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Working\ Capital\ Turnover = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja}} \dots\dots\dots (9)$$

b. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Assets Turnover*)

Perputaran Aset Tetap (*Fixed Assets Turnover*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik artinya kemampuan aktiva tetap dalam menciptakan penjualan tinggi. Standar yang digunakan untuk perputaran aset tetap adalah 5 kali (Kasmir, 2012). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Fixed Assets Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva Tetap}} \dots\dots\dots (10)$$

4.4.4. Perbandingan Kinerja BUMDes dan KUD

Perbandingan kinerja BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur dianalisis dengan menggunakan uji t sampel tak berkorelasi (*independent sample t test*), yaitu dengan membandingkan (komparasi) secara statistik antara berbagai indikator rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas) pada BUMDes dengan KUD yang ada di Desa Bukit Intan Makmur. Adapun uji t independen dapat dirumuskan sebagai berikut (Siregar, 2014):

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n1-1)S_1^2 + (n2-1)S_2^2}{n1 + n2 - 2} \left(\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2} \right)}} \dots\dots\dots (10)$$

Keterangan:

\bar{X}_1 = Rata-rata pada sampel 1

\bar{X}_2 = Rata-rata pada sampel 2

S_1^2 = Nilai varian pada sampel 1

S_2^2 = Nilai varian pada sampel 2

n_1 = jumlah anggota sampel 1

n_2 = jumlah anggota sampel 2

Sampel 1 = Kinerja keuangan BUMDes

Sampel 2 = Kinerja keuangan KUD

Hipotesis yang digunakan adalah: H_0 = Tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara BUMDes dengan KUD, H_a = Ada perbedaan kinerja keuangan antara BUMDes dengan KUD. Dengan alfa (α) sebesar 0,05, kriteria pengambilan keputusan yaitu: apabila $P\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 , dan sebaliknya apabila $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak.

BAB V. **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

5.1. Keadaan Geografis dan Administratif

Desa Bukit Intan Makmur merupakan salah satu dengan transmigrasi Era Presiden Soeharto yang didirikan pada tahun 1990, yang awal pembentukannya diberi nama Desa Prambanan/ KUPT II. Dengan luas wilayah administratif sebesar 1.060 Km² atau seluas 106 Ha, desa tersebut terbagi atas 3 dusun yaitu Dusun Karya Makmur, Bukit Pandan, dan Suka Maju dengan jumlah RT sebanyak 9 dan RW sebanyak 3. Desa Bukit Intan Makmur dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dari tahun 2019 dijabat oleh Bapak Nasta'in, S.Pd. Adapun batasan wilayah Desa Bukit Intan Makmur yaitu sebagai berikut (Kantor Desa Bukit Intan Makmur, 2019):

Sebelah Utara	: Desa Bagan Tujuh
Sebelah selatan	: Desa Rimba Jaya
Sebelah Barat	: Kelurahan Kota Lama
Sebelah Timur	: Desa Muara Intan

Desa Bukit Intan Makmur berada pada dataran rendah dengan tinggi 2 meter dpl. Desa tersebut memiliki topografi yang berbukit-bukit, dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dengan suhu minimum 21⁰C, maksimum 28⁰C dan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 3.487 mm/tahun.

5.2. Keadaan Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pelaksanaan pembangunan nasional, karena selain sebagai objek, penduduk juga merupakan subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu perannya akan dapat menentukan perkembangan pembangunan dalam skala nasional.

5.2.1. Umur

Umur atau usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan) (Hoetomo, 2005). Data struktur umur merupakan informasi yang sangat penting, karena menjadi dasar dalam perhitungan berbagai indikator kependudukan seperti rasio ketergantungan total, jumlah angkatan kerja, indikator fertilitas dan juga berbagai indikator lainnya (BPS, 2010). Adapun data mengenai struktur umur penduduk di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019.

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1	0 - 5 tahun	241	13,062
2	6 - 13 tahun	296	16,043
3	14 - 18 tahun	592	32,087
4	19 - 25 tahun	247	13,388
5	26 - 45 tahun	180	9,756
6	46 - 57 tahun	225	12,195
7	≥ 58 tahun	64	3,469
Total		1845	100,000

Sumber: Monografi Desa Bukit Intan Makmur (2019)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa penduduk yang ada di Desa Bukit Intan Makmur menurut kelompok (rentang) umur bervariasi, namun paling banyak berada pada kelompok umur 14 – 18 tahun dengan jumlah sebanyak 592 jiwa atau dengan persentase sebesar 32,09% terhadap total penduduk. Sementara itu pada kelompok umur 0 – 5 tahun ada sebanyak 241 jiwa atau sebesar 13,06%, kelompok

umur 6 – 13 tahun sebanyak 296 jiwa (16,04%), 19 - 25 tahun sebanyak 247 jiwa (13,39%), 26 - 45 tahun sebanyak 180 jiwa (9,76%), 46 - 57 tahun sebanyak 225 jiwa (12,20%), dan \geq 58 tahun sebanyak 64 jiwa (3,47%).

5.2.2. Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan. Penduduk yang da di Desa Bukit Intan Makmur terdiri beberapa latar belakang agama, yaitu Islam, Protestan, dan Katolik. Adapun distribusi penduduk berdasarkan agama yang dipeluk dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019.

No	Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	1.789	96,965
2	Protestan	12	0,650
3	Katolik	44	2,385
Total (Orang)		1.845	100,000

Sumber: Monografi Desa Bukit Intan Makmur (2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hampir seluruh penduduk di Desa Bukit Intan Makmur memeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 1.789 jiwa atau dengan persentase sebesar 95,96% terhadap total jumlah penduduk. Selain itu ada pula penduduk yang beragama Protestan terdapat sebanyak 12 jiwa atau sebesar 0,65% dan jumlah penduduk beragama Katolik terdapat sebanyak 44 jiwa atau sebesar 2,38%.

5.3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir dan daya serap terhadap teknologi baru seseorang dalam menjalankan usahanya, yang mana akan mempengaruhi produktivitas (Soekartawi, 2000). Semakin tinggi lama pendidikan seseorang, maka kemampuannya dalam menerapkan suatu ilmu pada usaha akan semakin baik, sehingga pendapatan yang akan diterima juga semakin tinggi. Adapun keadaan pendidikan penduduk di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	130	7,71
2	Tidak Sekolah	206	12,22
4	Tamatan SD	631	37,43
5	Tamatan SMP/ Sederajat	363	21,53
6	Tamatan SMA/ Sederajat	304	18,03
7	Tamatan Perguruan Tinggi	52	3,08
Total (Orang)		1.686	100,00

Sumber: Monografi Desa Bukit Intan Makmur (2019)

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan formalnya, maka penduduk yang ada di Desa Bukit Intan Makmur pada tahun 2019 memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi. Dengan jumlah terbanyak yaitu ada pada tamatan SD dengan jumlah sebanyak 631 jiwa atau dengan persentase 37,43% terhadap total penduduk keseluruhan. Selain dari pada itu penduduk di Desa Bukit Intan Makmur tersebar pada kelompok latar belakang pendidikan belum sekolah terdapat sebanyak 130 jiwa (7,71%), tidak sekolah 206 jiwa (12,22%), tamatan SMP/ sederajat 363 jiwa (21,53%), tamatan SMA/ sederajat 304 jiwa (18,03%), dan tamatan perguruan tinggi sebanyak 52 jiwa (3,08%).

Selain dari pada keadaan pendidikan penduduk, kondisi lembaga pendidikan juga sangat penting dalam kaitannya untuk mencetak sumberdaya manusia yang terdidik. Lembaga pendidikan merupakan suatu institusi atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar-mengajar berlangsung yang terdiri dari lembaga pendidikan formal dan non formal. Adapun keadaan lembaga pendidikan yang ada di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Lembaga Pendidikan yang Ada Di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	PAUD	2
2	TK	2
3	PDTA	3
4	Sekolah Dasar (SD)	6
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	4
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	8
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	4
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	4
9	Madrasah Aliyah (MA)	4

Sumber: Monografi Desa Bukit Intan Makmur (2019)

Tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat 9 jenis lembaga pendidikan yang ada di Desa Bukit Intan Makmur, yang terdiri dari PAUD dengan jumlah sebanyak 2 unit, TK sebanyak 2 unit, PDTA sebanyak 3 unit, SD sebanyak 6 unit, MI sebanyak 4 unit, SMP sebanyak 8 unit, MTs sebanyak 4 unit, SMK sebanyak 4 unit, dan MA sebanyak 4 unit.

5.4. Mata Pencaharian Penduduk

Salah satu yang menentukan pendapatan penduduk adalah mata pencarian, mata pencarian penduduk penduduk di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terdiri dari petani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh, guru, bidan/ perawat, polisi, sopir,

dan wiraswasta. Untuk melihat lebih rinci mata pencaharian penduduk Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019.

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	142	43,558
2	Pedagang	29	8,896
3	PNS	16	4,908
4	Buruh	83	25,460
5	Guru	22	6,748
6	Bidan/ Perawat	3	0,920
7	Polisi	1	0,307
8	Sopir	21	6,442
9	Wiraswasta	9	2,761
Jumlah		326	100,000

Sumber: Monografi Desa Bukit Intan Makmur (2019)

Berdasarkan Tabel 6 pada tahun 2019 terdapat sebanyak 326 jiwa penduduk yang bekerja di Desa Bukit Intan Makmur, dimana sebagian besar diantaranya bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah sebanyak 142 jiwa atau sebesar 43,56% dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan penduduk lainnya bekerja sebagai buruh tani sebanyak 562 jiwa atau dengan persentase 21,02%, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 79 jiwa (2,95%), wirausaha sebanyak 205 jiwa (11,41%), peternak sebanyak 113 jiwa (4,23%), nelayan sebanyak 29 jiwa (1,08%), dokter 1 jiwa (0,04%), polisi 48 jiwa (1,80%), notaris 2 jiwa (0,07%), dukunurut 4 jiwa (0,15%), dan wiraswasta sebanyak 238 jiwa (8,90%).

5.5. Keadaan Pertanian

Pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam perekonomian nasional, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat di pedesaan adalah pertanian yang memiliki peranan penting bagi kehidupannya (Dahar dan Fatmawati, 2016). Begitu pula dengan Desa Bukit Intan Makmur, yang mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian khususnya pada perkebunan kelapa sawit. Secara garis besar tanaman pertanian yang dijadikan mata pencaharian masyarakat di Desa Bukit Intan Makmur terbagi atas 2 sub sektor, yakni sub sektor tanaman perkebunan dan peternakan. Adapun keadaan perkebunan di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Luas Lahan Tanaman Perkebunan di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019

No	Jenis Tanaman	Luas lahan (Ha)
1	Tebu	1,00
2	Kelapa Sawit	834,00
3	Karet	2,00
4	Kelapa	3,00
5	Singkong	3,00
6	Lain-lain	10,00

Sumber: Monografi Desa Bukit Intan Makmur (2019)

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari kelompok tanaman maka yang banyak diusahakan oleh sebagian besar penduduk di Desa Bukit Intan Makmur adalah tanaman kelapa sawit yaitu dengan luas lahan sebesar 834 Ha. Selain itu tanaman lainnya yang juga diusahakan yaitu tebu seluas 1 Ha, tanaman karet seluas 2 Ha, kelapa 3 Ha, singkong 3 Ha, dan tanaman lain-lainnya seluas 10 Ha.

Sedangkan keadaan peternakan yang ada di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Populasi Ternak di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2019

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)
1	Kambing	250
2	Sapi	250
3	Ayam	1.500
4	Itik	50
5	Burung	25

Sumber: Monografi Desa Bukit Intan Makmur (2019)

Sedangkan berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa ternak yang banyak diusahakan oleh penduduk di Desa Bukit Intan Makmur yaitu adalah kambing dengan populasi sebanyak 250 ekor, sapi sebanyak 250 ekor, ayam sebanyak 1.500 ekor, itik 50 ekor, dan burung sebanyak 25 ekor.

BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Profil BUMDes dan KUD

Menurut Agustrijanto (2001) profil perusahaan atau *company profile* yaitu gambaran umum mengenai diri suatu perusahaan yang akan menyiratkan jiwa berusaha perusahaan tersebut. Dalam wadah kegiatan suatu organisasi/ perusahaan tersebut, setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Untuk itu suatu organisasi haruslah mengandung unsur *man* (orang-orang), kerjasama, tujuan, arah, atau sasaran bersama, peralatan (*equipment*), lingkungan (*environment*), sumberdaya, dan kerangka atau konstruksi mental organisasi (Wursanto, 2003). Dalam penelitian ini aspek organisasi yang dianalisis yaitu meliputi nama lengkap perusahaan, badan hukum/landasan pendirian, struktur organisasi, unit usaha, dan jumlah anggota. Adapun secara ringkas profil BUMDes dan KUD yang ada di Desa Bukit Intan Makmur disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Profil BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Uraian	BUMDes*	KUD**
1	Nama	BUMDes Usaha Makmur	KUD Bukit Intan Makmur
2	Badan Hukum	SK Kepala Desa Bukit Intan Makmur No.4 Tahun 2009	SK Menteri Koperasi & UKM RI No. 1829/BH/XIII/07 Januari 1994
3	Ketua/ Direktur	Suratman	Slamet Warsono
4	Unit Usaha	1. Simpan pinjam 2. Pelayanan pembayaran dan transfer online 3. Agen gas LPG 3 kg	1. Jasa angkutan TBS 2. Pupuk 3. Waserda 4. Simpan pinjam 5. Sirtu, pasir, tanah timbun, dan tangkos
5	Anggota	Seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif	315 orang

Sumber: * = Laporan Tahunan BUMDes Usaha Makmur 2018

** = Laporan Tahunan KUD Bukit Intan Makmur 2018

Tabel 9 menunjukkan bahwa BUMDes Usaha Makmur dibentuk atas dasar SK Kepala Desa Bukit Intan Makmur No.4 Tahun 2009, sedangkan KUD Bukit Intan Makmur dibentuk atas dasar SK Menteri Koperasi & UKM RI No. 1829/BH/XIII Tanggal 07 Januari Tahun 1994. Sesuai dengan definisi BUMDes dalam Pasal 1 ayat 6 Permendagri No. 39 Tahun 2010 yaitu merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sementara itu koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. BUMDes adalah organisasi bisnis yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa sedangkan KUD adalah organisasi rakyat yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Dalam pengelolaannya, BUMDes Usaha Makmur dipimpin oleh seorang direktur bernama Bapak Suratman disertai dengan 4 orang pengurus lainnya yang masing-masing menjabat sebagai Ketua Unit Simpan Pinjam, Saff Keuangan, Staff Administrasi, dan Staff Umum, dibawah nasihat Kelapa Desa dan diawasi oleh badan pengawas (terdiri dari BPD, LPMD, dan tokoh perempuan). KUD Bukit Intan Makmur dipimpin oleh seorang ketua koperasi bernama Bapak Slamet Warsono disertai dengan 2 orang pengurus lainnya masing-masing menjabat sebagai sekretaris dan bendahara, dan 6 orang karyawan, serta dalam pengelolaannya diawasi oleh 3 orang pengawas (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1).

Selain itu dalam BUMDes, istilah anggota merujuk kepada orang atau nasabah yang berpartisipasi dalam memberikan sumbangan modal ke layanan unit simpan pinjam BUMDes, maka otomatis akan dikategorikan sebagai anggota. Sedangkan istilah anggota dalam KUD merujuk kepada para pemilik modal (ekuitas) yang mana per 31 Desember Tahun 2018 berjumlah sebanyak 315 orang. BUMDes Usaha Makmur bergerak pada bidang usaha utama simpan pinjam, disamping itu juga menawarkan pelayanan pembayaran dan transfer online, serta menjadi agen gas LPG 3 kg. Sementara itu KUD bergerak pada bidang usaha utama pada jasa pengangkutan TBS dan penjualan barang, selain itu juga menawarkan jasa simpan pinjam. Meskipun memiliki unit usaha yang sama yaitu unit usaha simpan pinjam, namun unit usaha tersebut bukanlah bidang usaha utama KUD. Hal itu ditunjukkan dari kontribusi pendapatan simpan pinjam pada KUD terhadap total pendapatan kotor yaitu sebesar Rp. 121.233.988 (9,17%).

6.2. Struktur dan Perkembangan Aktiva, Hutang, Modal, dan Laba/SHU

6.2.1. Aktiva (Aset)

Menurut Soemarso (2009) aktiva adalah bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya (*resources*) bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Sumber pembelanjaan menunjukkan siapa yang membelanjakan kekayaan, maka aktiva harus selalu sama dengan sumber pembelanjannya. Pihak yang menyediakan sumber pembelanjaan (baik investor, kreditur, maupun supplier) mempunyai hak klaim terhadap aktiva perusahaan. Struktur aktiva (aset) pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Struktur Akvita (Aset) pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Uraian	Nilai (Rp)
----	--------	------------

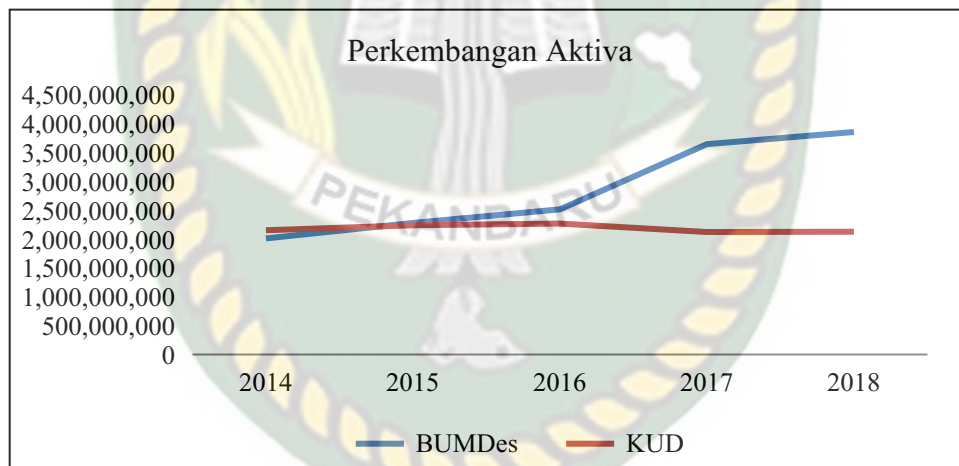
		BUMDes	KUD
A	Aktiva Lancar	3.549.109.783	1.561.133.850
1	Kas	322.163.000	234.942.615
2	Bank	34.062.783	26.041.980
3	Piutang Usaha	3.192.884.000	1.032.952.716
4	Biaya dibayar dimuka	0	213.578.539
5	Persediaan	0	52.699.000
6	Aktiva lancar lainnya	0	919.000
B	Aktiva Tetap	301.449.412	563.840.203
	Total Aktiva	3.850.559.195	2.124.974.053

Tabel 10 menunjukkan bahwa per 31 Desember 2018 total aktiva (aset) pada BUMDes Usaha Makmur yaitu sebesar Rp. 3.850.559.195, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai total aktiva (aset) KUD Bukit Intan Makmur yaitu sebesar Rp. 2.124.974.053. Nilai aktiva lancar BUMDes yaitu sebesar Rp. 3.549.109.783, yang terdiri dari kas sebesar Rp. 322.163.000, simpanan di bank sebesar Rp. 34.062.783, dan piutang usaha sebesar Rp. 3.192.884.000 yang berupa piutang dari pinjaman modal kerja, pinjaman konsumtif. Sedangkan nilai aktiva lancar KUD yaitu sebesar 1.561.133.850, yang sebagian besar disumbang dari piutang usaha berupa piutang pupuk, piutang waserda, dan piutang pinjaman dengan nilai sebesar Rp. 1.032.952.716 atau dengan persentase sebesar 66,16% dari nilai aktiva lancar.

Aktiva tetap baik pada BUMDes maupun KUD terbatas hanya pada nilai buku gedung dan peralatan yang telah dikurangi akumulasi penyusutan, dimana pada BUMDes diketahui sebesar Rp. 301.449.412 dan KUD sebesar Rp. 563.840.203. Tingginya nilai aktiva tetap pada KUD disebabkan karena karakteristik bidang usaha utamanya yaitu jasa pengangkutan TBS, yang membutuhkan kendaraan pengangkutan berat berupa *dumb truck* dengan nilai buku yang cukup tinggi. Berbeda dengan BUMDes yang bidang usaha utamanya

berupa jasa simpan pinjam, yang tidak membutuhnya peralatan (*equipment*) khusus namun memiliki piutang dagang yang tinggi.

Berdasarkan pada Gambar 2 dan Lampiran 2 selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa perkembangan aset BUMDes Usaha Makmur terus mengalami peningkatan secara konstan, dari sebesar Rp. 2.008.925.075 menjadi Rp. 3.850.559.195, dengan peningkatan tertinggi yaitu pada Tahun 2017 sebesar 44,91%. Peningkatan yang signifikan tersebut sebagian besar disumbang dari peningkatan piutang usaha dari penyaluran kredit pinjaman modal kerja dan konsumtif (Lampiran 3). Sementara itu, perkembangan aset pada KUD Bukit Intan Makmur selama Tahun 2014-2018 relatif stagnan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana persentase perubahan yang terjadi tidak lebih dari 2 digit.



Gambar 2. Perkembangan Aktiva (Aset) BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.

6.2.2. Hutang (Liabilitas)

Menurut Munawir (2014), hutang atau kewajiban adalah semua hutang keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Hutang suatu perusahaan timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang (Jusuf, 2001). Hutang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk

membiayai kebutuhan dananya. Struktur hutang (liabilitas) pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur disajikan pada Tabel 11.

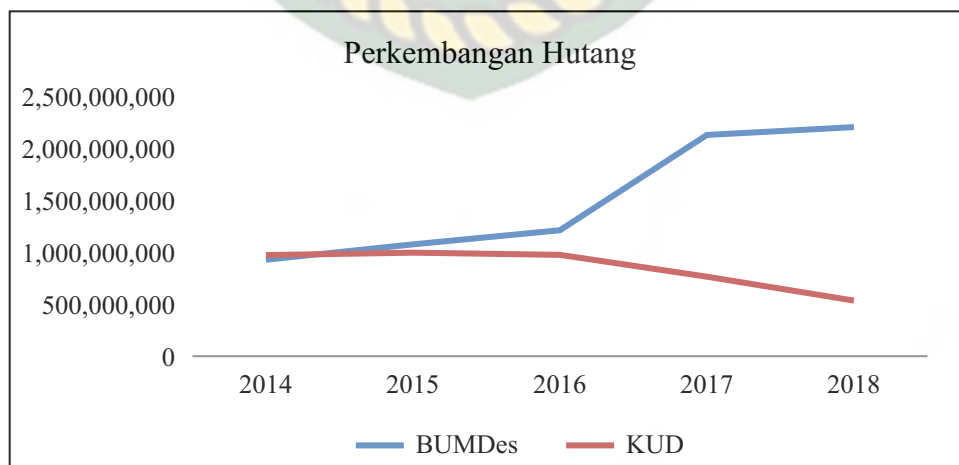
Tabel 11. Stuktur Hutang (Liabilitas) pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Uraian	Nilai (Rp)	
		BUMDes	KUD
A	Hutang Lancar	2.202.340.017	534.456.296
1	Hutang usaha/ dagang	2.179.438.583	248.603.600
2	Hutang bank	0	66.660.000
3	Biaya yang masih harus dibayar	770.434	60.000.000
4	Hutang pihak ketiga	22.131.000	0
5	SHU bagian anggota	0	46.055.823
6	Hutang dana-dana	0	113.136.873
B	Hutang Jangka Panjang	0	0
	Total Hutang	2.202.340.017	534.456.296

Tabel 11 menunjukkan bahwa jenis hutang yang dimiliki oleh BUMDes maupun KUD adalah hutang lancar, yaitu hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dalam siklus operasi normal perusahaan. Total nilai hutang yang dimiliki BUMDes Usaha Makmur per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 2.202.340.017, yang sebagian besar (Rp. 2.179.438.583 atau 98,96%) merupakan hutang usaha yang berasal dari dana simpanan nasabah. Selain itu hutang lainnya oleh BUMDes yaitu hutang biaya yang masih harus dibayar (BYMHD) sebesar Rp. 770.434 dan hutang pihak ketiga sebesar Rp. 22.131.000. Total nilai hutang oleh KUD Bukit Intan Makmur yaitu sebesar Rp. 534.456.296, yang sebagian besar merupakan hutang dagang atas pembelian pupuk, pestisida, dan berbagai barang waserda dengan nilai sebesar Rp. 248.603.600 dan hutang dana-dana sebesar Rp. 113.136.873 yang terdiri dari hutang dana pendidikan, pemdaker, dan dana sosial untuk desa. Selain itu hutang lainnya yaitu hutang bank, biaya yang masih harus

dibayarkan (BYMHD), dan SHU anggota yang masing-masing sebesar Rp. 66.660.000, Rp. 60.000.000, dan Rp. 46.055.823.

Berdasarkan Gambar 3 dan Lampiran 2, sejalan dengan perkembangan asetnya selama Tahun 2014-2018 perkembangan hutang BUMDes Usaha Makmur juga terus mengalami peningkatan secara konstan, dari sebesar Rp. 927.475.335 menjadi Rp. 2.202.340.017, dengan peningkatan tertinggi yaitu pada Tahun 2017 sebesar 75,65%. Peningkatan yang signifikan tersebut sebagian besar disumbang dari peningkatan hutang simpanan nasabah yang digunakan sebagai modal untuk penyaluran kredit pinjaman modal kerja dan konsumtif (Lampiran 3). Sebaliknya, perkembangan hutang pada KUD Bukit Intan Makmur selama Tahun 2014-2018 justru cenderung mengalami penurunan dari Rp. 972.087.784 menjadi Rp. 534.456.296, meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada Tahun 2015 sebesar 2,39%. Kecenderungan penurunan nilai hutang ini menandakan hal yang positif, yang artinya kemampuan KUD untuk tidak bergantung pada hutang dalam pembiayaan kegiatan operasionalnya semakin tinggi. Meskipun begitu peningkatan jumlah hutang tidak selalu menandakan hal yang buruk selama diikuti dengan kemampuan untuk membayar, terlebih lagi untuk lembaga keuangan.



Gambar 3. Perkembangan Hutang (Liabilitas) BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.

6.2.3. Modal (Ekuitas)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), modal (ekuitas) adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban/ hutang. Modal (ekuitas) dapat diperoleh dari 2 cara, yaitu: (1) setoran dari pemilik perusahaan, dalam konteks BUMDes maka pemilik perusahaan adalah Pemerintah Desa Bukit Intan Makmur, sedangkan KUD pemilik perusahaan yaitu para anggota koperasi; (2) modal dari hasil kegiatan operasi bisnis melalui laba/SHU ditahan; dan (3) dapat juga berupa modal dari kegiatan non operasi seperti hibah/bantuan. Adapun struktur modal pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 12.

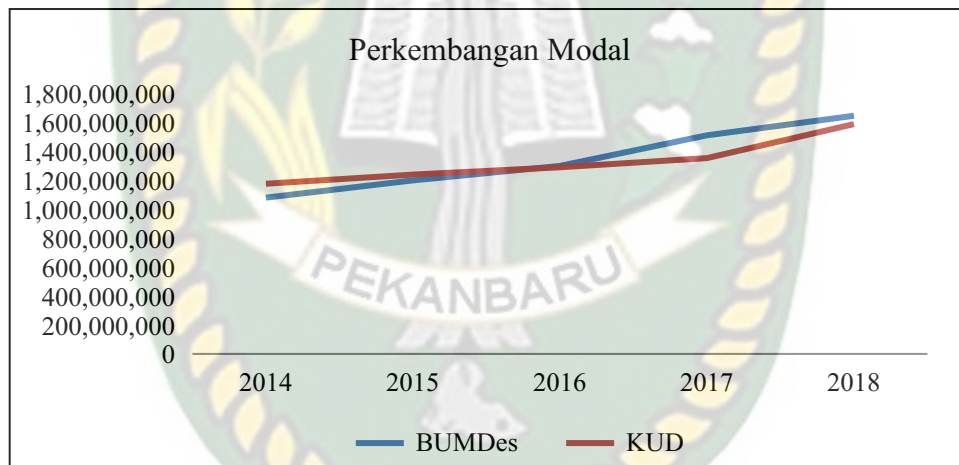
Tabel 12. Struktur Modal (Ekuitas) pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Sumber Modal	Nilai (Rp)	
		BUMDes	KUD
1	Modal dasar	503.177.500	419.578.732
2	Hibah/ donasi	115.756.000	52.145.425
3	Cadangan modal	759.394.732	853.453.832
4	Laba tahun berjalan	269.890.946	265.339.768
	Total	1.648.219.178	1.325.177.989

Berdasarkan pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa jumlah modal pada BUMDes Usaha Makmur per 31 Desember 2018 yaitu sebanyak Rp. 1.648.219.178, yang terdiri dari modal dasar dari pemerintah desa sebanyak Rp. 503.177.500 (30,53%) yang merupakan modal pemilik perusahaan, bantuan/hibah sebanyak Rp. 115.756.000 (7,02%) yang merupakan modal dari kegiatan non operasi, serta modal dari kegiatan operasi yaitu cadangan modal dengan jumlah sebesar Rp. 759.394.732 (46,07%), dan laba tahun berjalan sebesar Rp. 269.890.946 (16,37%). Sedangkan jumlah modal pada KUD Bukit Intan Makmur

per 31 Desember 2018 yaitu sebanyak Rp. 1.325.177.989, yang terdiri dari modal dasar dari simpanan anggota (simpanan pokok, wajib, dan khusus) sebanyak Rp. 419.578.732 (31,66%), donasi sebanyak Rp. 52.145.425 (3,93%), cadangan modal Rp. 853.453.832 (64,405), dan laba tahun berjalan Rp. 265.339.768 (20,02%).

Berdasarkan pada Gambar 4 dan Lampiran 2, dapat dilihat selama Tahun 2014-2018 baik perkembangan modal pada BUMDes Usaha Makmur dan KUD Bukit Intan Makmur relatif hampir sama jumlahnya dengan kecenderungan yang juga sama-sama meningkat. Pada BUMDes peningkatan modal tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 16,29%, sedangkan pada KUD terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 17,37%.



Gambar 4. Perkembangan Modal (Ekuitas) BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.

6.2.4. Laba/ SHU (Sisa Hasil Usaha)

Menurut Harahap (2009), laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU No. 17 Tahun 2012 adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Pada prinsipnya laba dan SHU memiliki makna yang sama, hanya saja konteks penggunaan istilahnya yang

berbeda, biasanya laba digunakan untuk merujuk pada kelebihan pendapatan bersih (setelah dikurangi biaya dan beban) pada badan usaha biasa, sedangkan SHU digunakan pada badan usaha koperasi. Adapun nilai laba/SHU yang dihasilkan pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Pendapatan dan Laba/ SHU pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

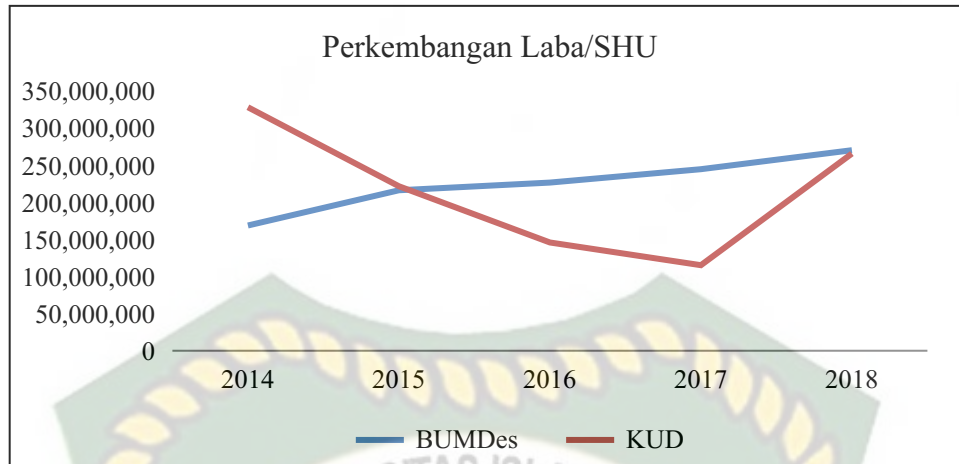
BUMDes			
No	Uraian	Nilai (Rp)	Persentase (%)
A	Pendapatan Operasi	804.451.481	100,00
1	Jasa Pinjaman Modal kerja	736.182.000	91,51
2	Jasa Pinjaman Konsumtif	20.499.250	2,55
3	Jasa Giro	47.770.231	5,94
B	Laba bersih	269.890.946	33,55
KUD			
No	Uraian	Nilai (Rp)	Persentase (%)
A	Pendapatan Operasi	1.894.522.673	100,00
1	Penjualan Bersih Pupuk & Lain-lain	683.543.000	36,08
2	Simpan-Pinjam	84.003.282	4,43
3	Angkutan TBS dan lain-lain	1.126.976.391	59,49
B	SHU Bersih	265.339.768	14,01

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 BUMDes Usaha Makmur menghasilkan pendapatan operasi sebesar Rp. 804.451.481, dimana sebesar Rp. 736.182.000 atau 91,51% berasal dari pendapatan jasa pinjaman modal kerja, sedangkan sisanya berasal dari pendapatan jasa pinjaman konsumtif sebesar Rp. 20.499.250 (2,55%) dan pendapatan jasa giro sebesar Rp. 47.770.231 (5,94%). Sedangkan KUD Bukit Intan Makmur menghasilkan total pendapatan operasi sebesar 1.894.522.673, yang terdiri dari pendapatan bersih pupuk dan lain-lain

sebesar Rp. 683.543.000 (36,08%), pendapatan simpan pinjam Rp. 84.003.282 (4,43%), dan pendapatan atas jasa angkutan TBS dan lain-lain sebesar 1.126.976.391 (59,49). Sementara itu laba bersih yang dihasilkan BUMDes yaitu sebesar Rp. 269.890.946 (33,55%) dan SHU bersih yang dihasilkan KUD yaitu sebesar Rp. 265.339.768 (14,01%).

Meskipun nilai pendapatan operasi yang diperoleh KUD lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai pendapatan operasi BUMDes, namun justru BUMDes lebih *profitable* (menguntungkan) dibandingkan KUD. Dimana proporsi laba bersih BUMDes (33,55%) yang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi SHU bersih KUD yaitu sebesar 14,01% terhadap total pendapatan operasi. Hal ini dapat dijelaskan karena besarnya biaya dan beban pada KUD khususnya biaya pokok penjualan dan beban administrasi & umum yang jika digabungkan mencapai 42,41% terhadap total pendapatan operasi (Lampiran 6).

Berdasarkan pada Gambar 5 dan Lampiran 2, dapat dilihat bahwa selama Tahun 2014-2018 perkembangan laba BUMDes cenderung mengalami peningkatan dari Rp. 168.563.837 menjadi Rp. 269.890.946. Peningkatan laba tertinggi terjadi pada Tahun 2015 dengan persentase sebesar 28,14%. Sedangkan perkembangan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada KUD selama Tahun 2014-2018 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2015 perolehan SHU KUD terus mengalami penurunan hingga Tahun 2017, dari Rp. 327.725.126 menjadi Rp. 115.139.558. Meskipun begitu, selanjutnya pada Tahun 2018 perolehan SHU KUD mulai mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp. 265.339.768 dengan persentase peningkatan sebesar 130,45%.



Gambar 5. Perkembangan Laba/SHU BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.

6.3. Kinerja Keuangan BUMDes dan KUD

Kinerja keuangan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan. Beberapa rasio keuangan yang digunakan dalam analisis ini yaitu rasio likuiditas (meliputi: *quick ratio* dan *cash ratio*); rasio solvabilitas (meliputi: rasio modal sendiri atas hutang/DTER dan rasio hutang/*debt ratio*); rasio rentabilitas (meliputi: NPM, ROI, dan ROE); dan rasio aktivitas (meliputi: perputaran modal kerja/WCT dan perputaran aset tetap/FAT). Adapun rekapitulasi hasil analisis kinerja keuangan BUMDes dan KUD berdasarkan beberapa kriteria rasio keuangan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Rekapitulasi Rasio Keuangan BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2014-2018.

No	Rasio Keuangan	Satuan	Rata-rata nilai		Standar	Keterangan	
			BUMDes	KUD		BUMDes	KUD
A Likuiditas							
1	<i>Quick Ratio</i>	%	182,63	210,56	≥ 150	Baik	Baik
2	<i>Cash Ratio</i>	%	19,17	63,57	50-70	Tdk baik	Baik
B Solvabilitas							
1	DTER	%	108,51	65,64	≤ 90	Tdk baik	Baik
2	<i>Debt Ratio</i>	%	51,45	38,79	≤ 35	Tdk baik	Tdk baik
C Profitabilitas							

1	NPM	%	36,83	10,11	≥ 6	Baik	Baik
2	ROI	%	8,12	9,90	≥ 30	Tdk baik	Tdk baik
3	ROE	%	16,70	16,42	≥ 40	Tdk baik	Tdk baik
D	Aktivitas						
1	WCT	Kali	0,24	0,56	≥ 6	Tdk baik	Tdk baik
2	FAT	Kali	3,31	1,72	≥ 5	Tdk baik	Tdk baik

6.3.1. Rasio Likuiditas

Menurut Munawir (2014), rasio likuiditas yaitu rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi suatu kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan dalam keadaan “likuid”. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio cepat (*quick ratio*) dan rasio kas (*cash ratio*). Adapun hasil analisis rasio likuiditas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Rasio Likuiditas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Rasio Likuiditas	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata	Pertumbuhan (%)
BUMDes								
1	<i>Quick Ratio</i>	207,50	193,88	191,81	158,82	161,15	182,63	-24,87
2	<i>Cash Ratio</i>	19,55	7,47	20,50	32,18	16,17	19,17	-037
KUD								
1	<i>Quick Ratio</i>	151,34	200,58	181,64	237,00	282,24	210,56	59,22
2	<i>Cash Ratio</i>	38,17	100,91	78,91	51,06	48,83	63,57	25,40

5.3.1.2. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat lancar atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (hutang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*) (Kasmir, 2012). Hal ini

dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan (kurang likuid), apabila sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan uang kas untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan Tabel 14 rata-rata nilai rasio cepat BUMDes Tahun 2014-2018 diperoleh 182,63% dan KUD sebesar 210,56% (masing-masing $> 150\%$), yang artinya kemampuan BUMDes maupun KUD dalam membayar hutang lancarnya dengan tanpa mempertimbangkan persediaan sangat baik.

Tabel 15 menunjukkan bahwa angka rasio cepat BUMDes Usaha Makmur selama pada Tahun 2014-2017 secara konstan mengalami penurunan meskipun masih berada pada kisaran nilai $> 150\%$ yaitu dari 207,50% menjadi 158,82%. Pada Tahun 2018 angka rasio tersebut mulai sedikit mengalami peningkatan menjadi 161,15%. Sementara itu, angka rasio cepat pada KUD Bukit Intan Makmur selama tahun 2014-2018 masih berada $> 150\%$, dimana dalam perkembangannya sempat mengalami penurunan pada Tahun 2016 dari 200,58% menjadi 181,64%, namun setelah itu hingga tahun 2018 terun mengalami peningkatan menjadi 282,24%.

5.3.1.2. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Rasio kas atau (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang lancar. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Berdasarkan Tabel 14 rata-rata nilai rasio kas BUMDes Tahun 2014-2018 adalah sebesar 19,17% (tidak baik) dan KUD sebesar 63,57% (baik), yang artinya kemampuan BUMDes untuk melunasi hutang lancarnya dengan uang kas atau

setara kas tidak baik, sedangkan kemampuan KUD baik. Meskipun begitu, likuiditas yang tinggi juga belum tentu baik karena perusahaan masih memiliki banyak dana yang menganggur, hal tersebut berarti perusahaan belum mampu untuk menggunakan dana yang dimiliki secara baik dan optimal sehingga akan berdampak pada menurunnya laba perusahaan.

Tabel 15 menunjukkan bahwa perkembangan rasio kas BUMDes Usaha Makmur selama pada Tahun 2014-2018 berfluktuasi, dengan nilai keseluruhan berada $< 50\%$, yang artinya tergolong pada kriteria tidak baik. Dimana nilai rasio kas tertinggi yaitu pada Tahun 2017 sebesar $32,18\%$ dan terendah pada Tahun 2015 sebesar $7,47\%$. Sementara itu selama Tahun 2014-2018, rasio kas KUD Bukit Intan Makmur berfluktuatif, dimana nilai rasio kas berada pada kriteria baik ($50\%-70\%$) yaitu hanya pada Tahun 2017 dengan nilai sebesar $51,06\%$, dan pada tahun 2014 dan 2018 berada pada kriteria tidak baik ($<50\%$) yaitu masing-masing sebesar $38,17\%$ dan $48,83\%$. Sedangkan pada Tahun 2015 dan 2016 rasio kas menunjukkan nilai masing-masing sebesar $100,91\%$ dan $78,91\%$ ($>70\%$), yang artinya kemampuan KUD dalam mengelola kas masih belum optimal. Hal menunjukkan bahwa KUD masih belum mampu mempertahankan dengan konsisten jumlah kas dan setara kas dengan baik dan optimal.

6.3.2. Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2012), rasio solvabilitas (*leverage*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luar dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh

kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio solvabilitas yang digunakan adalah *debt to equity ratio*/ rasio hutang terhadap modal sendiri (DTER) dan *debt to asset ratio*/ rasio hutang terhadap aset (*debt ratio*). Hasil analisis rasio solvabilitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Rasio Solvabilitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Rasio Solvabilitas	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata	Pertumbuhan (%)
BUMDes								
1	DTER	85,76	89,52	93,08	140,58	133,62	108,51	22,75
2	<i>Debt Ratio</i>	46,17	47,24	48,21	58,43	57,20	51,45	5,28
KUD								
1	DTER	82,54	80,20	75,43	56,41	33,60	65,64	-16,90
2	<i>Debt Ratio</i>	45,22	44,51	43,00	36,07	25,15	38,79	-6,43

5.3.2.1. *Debt to Equity Ratio* (DTER)

Debt to equity ratio (DTER) atau rasio hutang terhadap modal sendiri menggambarkan sampai sejauh mana modal yang dimiliki perusahaan cepat menutupi kewajiban-kewajiban kepada pihak luar (Kasmir, 2012). Semakin kecil rasio ini maka semakin baik, karena kemampuan modal sendiri dalam menjamin semua hutangnya akan semakin lebih besar. Tabel 14 menunjukkan bahwa rata-rata nilai DTER Tahun 2014-2018 pada BUMDes yaitu sebesar 108,51% (tidak baik) dan KUD sebesar 65,64% (baik), artinya kemampuan modal BUMDes dalam menutupi hutangnya tidak baik (tidak *solvable*), sedangkan KUD baik (*solvable*). Tingginya nilai rasio hutang terhadap modal sendiri pada BUMDes disebabkan karena bidang usaha utamanya unit simpan pinjam, sehingga sebagian besar kegiatan bisnisnya mengandalkan hutang dari uang simpanan nasabah.

Tabel 16 menunjukkan bahwa perkembangan nilai DTER BUMDes Usaha Makmur selama Tahun 2014-2017 cenderung mengalami peningkatan dari 85,76% menjadi 140,58%, dan sempat mengalami penurunan pada Tahun 2018 sebesar 133,62%. Sementara itu, sebaliknya adanya kecenderungan penurunan nilai DTER KUD Bukit Intan Makmur dari 82,54% hingga mencapai titik terendahnya pada Tahun 2018 yaitu sebesar 33,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BUMDes dalam membayar seluruh kewajibannya selama Tahun 2014-2018 menunjukkan kecenderungan semakin menurun, sedangkan KUD semakin meningkat.

5.3.2.2. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt to asset ratio (debt ratio) atau rasio hutang terhadap aset merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2012). Tabel 14 menunjukkan bahwa rata-rata nilai *debt ratio* Tahun 2014-2018 pada BUMDes yaitu sebesar 51,45% (baik) dan KUD sebesar 38,79% (baik), artinya kemampuan aset (aktiva) BUMDes dan KUD dalam menjamin hutangnya tergolong tidak baik (tidak *solvable*). Meskipun hutang yang dimiliki BUMDes dan KUD masih berada dibawah nilai aset, namun sangat beresiko untuk menjaminkan hutang yang bernilai >35% dari nilai aset.

Perkembangan *debt ratio* pada BUMDes Tahun 2014-2018 berdasarkan Tabel 16 menunjukkan bahwa fluktuasi dengan nilai keseluruhan berada > 35%, yang artinya tergolong pada kriteria yang tidak baik. Perkembangan nilai *debt ratio* selama Tahun 2014-2017 cenderung mengalami peningkatan dari 46,17% menjadi

58,43%, dan sempat mengalami penurunan pada Tahun 2018 sebesar 57,20%. Sedangkan perkembangan *debt ratio* pada KUD selama Tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan dari 45,22% menjadi 25,15% (<35%). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan aktiva BUMDes semakin tidak baik dalam menjamin hutangnya, sedangkan KUD semakin baik. Meskipun begitu peningkatan nilai *debt ratio* pada usaha sejenis perbankan yang bergerak pada bidang simpan-pinjam tidaklah menunjukkan keadaan yang buruk. Hal ini dikarenakan kegiatan bisnis utama dalam usaha perbankan adalah menghimpun dana simpanan nasabah (yang berarti hutang dalam sudut pandang perusahaan) dan menyalurkan kredit dari dana tersebut. Sehingga semakin tinggi hutang (dalam artinya dana simpanan nasabah) maka semakin baik bagi perusahaan.

6.3.3. Rasio Rentabilitas

Menurut Munawir (2014), rasio profitabilitas atau rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuannya dalam menggunakan aktiva secara produktif. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Investment* (ROI), dan *Return on Equity* (ROE). Hasil analisis rasio solvabilitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Rasio Rentabilitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Rasio Profitabilitas	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata	Pertumbuhan (%)
BUMDes								
1	NPM	38,56	38,49	38,02	35,53	33,55	36,83	-1,73
2	ROI	8,39	9,49	9,01	6,71	7,01	8,12	-0,27

3	ROE	15,59	17,98	17,40	16,15	16,37	16,70	1,11
KUD								
1	NPM	13,04	9,96	7,76	5,78	14,01	10,11	-2,93
2	ROI	15,24	9,90	6,43	5,43	12,49	9,90	-5,35
3	ROE	27,83	17,84	11,28	8,50	16,68	16,42	-11,40

5.3.3.1. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) atau margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa rata-rata NPM BUMDes pada Tahun 2014-2018 yaitu sebesar 36,83%, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata NPM KUD dengan nilai sebesar 10,11%. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes lebih *profitable* (menguntungkan) dibandingkan KUD. Dimana setiap 100% pendapatan kotor yang diperoleh dari kegiatan operasi BUMDes mengandung laba sebesar 36,83 dan KUD menghasilkan SHU sebesar 10,11%, yang mana masing-masing nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga acuan BI 7-DRRR (6,00%), yang artinya kemampuan BUMDes maupun KUD dalam menghasilkan laba/SHU tergolong baik.

Sementara itu, pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa nilai NPM BUMDes pada Tahun 2014-2018 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari 38,56% menjadi 33,55%. Sedangkan perkembangan nilai NPM pada KUD Bukit Intan Makmur berfluktuasi, dengan nilai tertinggi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 14,01% dan nilai terendah pada tahun 2017 sebesar 5,78%.

5.3.3.2. *Return on Investment* (ROI)

Return on Investment (ROI) atau hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal juga dengan nama *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu (Hanafi, 2004). ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Berdasarkan pada Tabel 14, dapat dilihat bahwa rata-rata ROI BUMDes Usaha Makmur pada Tahun 2014-2018 yaitu sebesar 8,12% (tidak baik) dan KUD Bukit Intan Makmur sebesar 9,90% (tidak baik), artinya bahwa kemampuan BUMDes dan KUD dalam menghasilkan laba/SHU bersih untuk pengembalian aktiva (aset) tergolong tidak baik). Dimana setiap 100% aset yang ditanamkan akan menghasilkan laba pada BUMDes sebesar 8,12% dan SHU pada KUD sebesar 9,90%. Hasil penelitian Rozi (2018) menyatakan hal yang senada, bahwa KUD hanya mampu menghasilkan laba/SHU dengan persentase satu digit terhadap pendapatan kotor.

Sementara itu, pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ROI BUMDes pada Tahun 2014-2018 berfluktuasi, dengan nilai tertinggi yaitu pada Tahun 2015 sebesar 9,49% dan terendah pada Tahun 2017 sebesar 6,71%. Sementara itu, rata-rata Nilai ROI pada KUD Bukit Intan Makmur juga berfluktuasi, dengan nilai tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 15,24% dan terendah pada Tahun 2017 sebesar 5,43%.

5.3.3.3. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Bringham dan Houston (2004), *Return on Equity* (ROE) adalah rasio dari pendapatan bersih (yang telah dikurangi pajak dan bunga) yang dapat mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. ROE dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas modal sendiri, sehingga ROE disebut juga sebagai rentabilitas modal sendiri. Berdasarkan pada Tabel 14, dapat dilihat bahwa rata-rata ROE BUMDes Usaha

Makmur dengan KUD Bukit Intan Makmur Tahun 2014-2018 memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, masing-masing sebesar 16,70% dan 16,42% (tidak baik), artinya kemampuan BUMDes dan KUD dalam menghasilkan keuntungan atas modal sendiri tergolong tidak baik (<40%). Dimana setiap 100% modal yang ditanamkan maka akan menghasilkan laba BUMDes sebesar 16,70% dan SHU KUD sebesar 16,42%.

Sementara itu, pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ROE BUMDes pada Tahun 2014-2018 berfluktuasi, dengan nilai tertinggi yaitu pada Tahun 2015 sebesar 15,59% dan terendah pada Tahun 2017 sebesar 16,15%. Sementara itu, rata-rata Nilai ROE pada KUD Bukit Intan Makmur juga berfluktuasi, dengan nilai tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 27,83% dan terendah pada Tahun 2017 sebesar 8,50%.

6.3.4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (*activity ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya atau untuk mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir, 2012). Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan menggunakan sumberdaya guna menunjang aktivitas perusahaan, dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal (Fahmi, 2013). Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio perputaran modal kerja (*working capital turnover*) dan perputaran aset tetap (*fixed asset turnover*). Hasil analisis rasio aktivitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Rasio Aktivitas pada BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Rasio Aktivitas	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata	Pertumbuhan (%)
BUMDes								
1	WCT	0,23	0,27	0,26	0,20	0,23	0,24	0,01
2	FAT	5,18	2,93	3,15	2,63	2,67	3,31	-1,87
KUD								
1	WCT	0,87	0,69	0,40	0,40	0,44	0,56	-0,31
2	FAT	2,45	1,34	1,30	2,31	1,21	1,72	-0,73

5.3.4.1. *Working Capital Turnover (WCT)*

Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turnover*) merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode (Kasmir, 2012). Berdasarkan pada Tabel 14, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai WCT BUMDes Usaha Makmur pada Tahun 2014-2018 sebesar 0,24 (tidak baik) dan KUD sebesar 0,56 (tidak baik). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perputaran modal kerja pada BUMDes dan KUD tergolong tidak baik, karena jauh berada di bawah standar yang ditetapkan (< 6 kali). Sementara itu, berdasarkan Tabel 18 perkembangan nilai WCT pada BUMDes pada Tahun 2014-2018 berkisar dibawah 1 kali (< 1 kali), dengan nilai tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 0,27 kali dan terendah pada Tahun 2017 sebesar 0,20 kali. Sedangkan perkembangan nilai WCT pada KUD Tahun 2014-2018 berkisar dibawah 1 kali (< 1 kali), dengan nilai tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 0,87 kali dan terendah pada Tahun 2017 sebesar 0,40 kali.

5.3.4.2. *Fixed Asset Turnover (FAT)*

Perputaran Aset Tetap (*Fixed Assets Turnover*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah

perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik artinya kemampuan aktiva tetap dalam menciptakan penjualan tinggi (Kasmir, 2012). Berdasarkan pada Tabel 14, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai FAT BUMDes Usaha Makmur pada Tahun 2014-2018 sebesar 3,31 (tidak baik) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai FAT KUD yaitu sebesar 1,72 (tidak baik). Meskipun begitu baik BUMDes maupun KUD, berdasarkan nilai tersebut maka efektivitas pemanfaatan aktiva tetap ke duanya masih tergolong tidak baik. Sementara itu, berdasarkan Tabel 18 perkembangan nilai FAT pada BUMDes pada Tahun 2014-2018 berfluktuasi, dengan nilai tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 5,18 kali dan terendah pada Tahun 2017 sebesar 2,63 kali. Sedangkan perkembangan nilai FAT pada KUD Tahun 2014-2018 berfluktuasi, dengan nilai tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 2,45 kali dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 1,21 kali.

Berdasarkan hasil analisis 4 rasio keuangan maka dapat ditarik kesimpulan:

(1) Rasio likuiditas menunjukkan bahwa kemampuan BUMDes dalam membayar hutang lancarnya tanpa mempertimbangkan persediaan tergolong baik (likuid), namun ketersediaan kas dan setara kas (yang merupakan aset paling likuid) tidak cukup baik untuk membayar hutang lancarnya. Sedangkan kemampuan KUD baik dari aset lancar tanpa persediaan maupun dari ketersediaan kas tergolong baik dalam membayar hutang lancarnya. (2) Rasio solvabilitas menunjukkan bahwa kemampuan BUMDes dalam menutupi seluruh hutangnya dengan modal tergolong tidak baik (tidak *solvabel*), sedangkan dengan total aktiva tergolong baik (*solvable*). Sementara itu kemampuan KUD dalam menutupi seluruh hutangnya baik dengan modal maupun dengan total aktiva tergolong tidak baik (tidak

solvabel). (3) Rasio rentabilitas menunjukkan bahwa kemampuan BUMDes dan KUD dalam menghasilkan laba dari penjualan tergolong baik, sedangkan baik dari aset maupun modal dalam menghasilkan keuntungan tergolong tidak baik. (4) Rasio aktivitas menunjukkan bahwa kemampuan KUD dalam memanfaatkan sumberdaya modal kerja dan aktiva tetapnya lebih baik dibandingkan BUMDes, meskipun masing-masing masih tergolong belum efektif berdasarkan standar yang berlaku.

6.4. Perbandingan Kinerja Keuangan BUMDes dan KUD

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis perbedaan secara statistik antara kinerja keuangan BUMDes Usaha Makmur dengan KUD Bukit Intan Makmur yaitu menggunakan uji t sampel tak berkorelasi (*independent sample t test*). Adapun hasil dari analisis komparasi kinerja keuangan BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Hasil Analisis Uji Komparasi Kinerja Keuangan BUMDes dan KUD di Desa Bukit Intan Makmur, Tahun 2018.

No	Rasio	Sig. (2-tailed)	Keterangan
A	Rasio Likuiditas		
1	Rasio Cepat	0,290	H0 diterima
2	Rasio Kas	0,070	H0 diterima
B	Rasio Solvabilitas		
1	DTER	0,021	H0 ditolak
2	Rasio Hutang	0,025	H0 ditolak
C	Rasio Profitabilitas		
1	NPM	0,000	H0 ditolak
2	ROI	0,380	H0 diterima
3	ROE	0,937	H0 diterima
D	Rasio Aktivitas		
1	WCT	0,010	H0 ditolak
2	FAT	0,020	H0 ditolak

Keterangan: pada taraf signifikansi (α) = 0,05

Berdasarkan pada Tabel 19, menunjukkan bahwa nilai Sig. (*2-tailed*) pada rasio cepat yaitu sebesar 0,290 ($>0,05$), maka H_0 diterima. Artinya bahwa secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rasio cepat pada BUMDes dengan KUD. Sementara itu pada rasio kas diketahui nilai Sig. (*2-tailed*) yaitu sebesar 0,070 ($< 0,05$), maka H_0 diterima. Artinya bahwa secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rasio kas pada BUMDes dengan KUD. Hal ini didukung oleh hasil analisis pada Tabel 14, yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio kas pada BUMDes dan KUD yang terpaut jauh yaitu masing-masing 19,17% dan 63,57%.

Pada rasio solvabilitas, dapat dilihat bahwa nilai Sig. (*2-tailed*) DTER dan debt ratio menunjukkan angka masing-masing 0,020 dan 0,025 ($<0,05$), maka H_0 ditolak. Artinya bahwa secara statistik ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara nilai DTER dan *debt ratio* pada BUMDes dengan KUD. Sementara itu pada rasio aktivitas, diketahui nilai Sig. (*2-tailed*) pada WCT dan FAT masing-masing sebesar 0,010 dan 0,020 ($<0,05$), maka H_0 ditolak. Artinya bahwa secara statistik ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara nilai WCT dan FAT pada BUMDes dengan KUD.

Pada rasio rentabilitas, diperoleh nilai Sig. (*2-tailed*) NPM sebesar 0,000 ($<0,005$), maka H_0 ditolak. Artinya bahwa secara statistik ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara nilai NPM dan *debt ratio* pada BUMDes dengan KUD. Sedangkan pada ROI dan ROE menunjukkan nilai Sig. (*2-tailed*) masing-masing sebesar 0,380 dan 0,987 ($>0,05$), maka H_0 diterima. Artinya bahwa secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara nilai ROI dan ROE pada BUMDes dengan KUD. Tidak adanya perbedaan secara statistik pada ROI dan

ROE antara BUMDes dengan KUD, disebabkan karena besaran rata-rata jumlah laba dan SHU yang dihasilkan tidak jauh berbeda yaitu masing-masing Rp. 225.023.442 dan 215.057.368, serta jumlah modal (ekuitas) yang masing-masing BUMDes Rp. 1.348.922.256 dan KUD Rp. 1.331.216.509 (Lampiran 2).



BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. BUMDes Usaha Makmur dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Desa, yang terdiri dari 1 orang direktur, 4 orang pengurus, dan 4 orang badan pengawas. Sedangkan KUD Bukit Intan Makmur dibentuk pada tahun 1994 berdasarkan SK Menkop & UKM, yang terdiri dari 3 orang pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara), 3 orang badan pengawas, dan 6 orang karyawan, dengan jumlah anggota 315 orang.
2. Total aktiva (aset) BUMDes yaitu sebesar Rp. 3.850.559.195 (terdiri dari aktiva lancar Rp. 3.549.109.783 dan aktiva tetap Rp. 301.449.412); hutang sebesar Rp. 2.202.340.017 (sebagian besar terdiri dari hutang dagang Rp. 2.179.438.583); modal (ekuitas) sebesar Rp. 1.648.219.178 (sebagian besar terdiri dari cadangan modal Rp. 759.394.732); laba sebesar Rp. 269.890.946. Pada KUD yaitu total aktiva (aset) yaitu sebesar Rp. 2.124.974.053 (terdiri dari aktiva lancar Rp. 1.561.133.850 dan aktiva tetap Rp. 563.840.203); hutang sebesar Rp. 534.456.296 (sebagian besar terdiri hutang dagang Rp. 248.603.600); modal (ekuitas) sebesar Rp. 1.325.177.989 (sebagian besar terdiri dari cadangan modal Rp. 853.453.832); dan SHU sebesar Rp. 265.339.768.
3. Kinerja keuangan BUMDes pada tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa rasio cepat 182,63%, rasio kas 19,17%, DTER 108,51%, debt ratio 51,45%, NPM 36,83%, ROI 8,12%, ROE 16,70%, WCT 0,24 kali, dan FAT 3,31

kali. Sedangkan kinerja keuangan KUD pada tahun 2014-2018 menunjukkan rasio cepat 210,56%, rasio kas 63,57%, DTER 65,64%, debt ratio 38,79%, NPM 10,11%, ROI 9,90%, ROE 16,42%, WCT 0,56 kali, dan FAT 1,72 kali. Dimana secara keseluruhan kinerja KUD lebih baik dibandingkan BUMDes.

4. Secara statistik, dengan tingkat signifikansi 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan (nyata) pada rasio kas, DTER, debt ratio, NPM, WCT, dan FAT antara BUMDes dengan KUD.

7.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlu adanya perhatian yang serius baik dari pemerintah daerah maupun pusat untuk terus membina BUMDes dan KUD sehingga dapat dengan maksimal berdampak pada perekonomian pedesaan serta dapat berkesimambungan.
2. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, pengurus baik BUMDes maupun KUD perlu memperhatikan beberapa kriteria rasio keuangan untuk menjamin kesehatan kinerja keuangan.
3. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi pedesaan BUMDes dan KUD perlu bersinergi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan bersifat saling melengkapi tanpa perlu saling bersaing untuk membangun perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustrijanto. 2001. Seni Mengasah Kreatifitas dan Memahami Bahasa. Iklan. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Akbar, A. A. 2009. Analisis Kinerja Keuangan dan Aktivitas Usaha KUD Sumber Alam dan Primkopti (Studi Kasus: KUD Sumber Alam dan Primkopti Kabupaten di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Karya Toha Putra, Semarang.
- Anoraga, P. 1995. Manajemen Koperasi Teori dan Praktek. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Baga, L. M. 2011. Profil dan Peran Wirakoperasi dalam Pengembangan Agribisnis [Laporan Akhir]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- BPS. 2010. Modul 1 Struktur Umur Penduduk. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Brigham, E. F. and Houston, 2004, Manajemen Keuangan, Edisi 9. Erlangga, Jakarta.
- Dahar, D. dan Fatmawati. 2016. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Kecamatan Randangan Kabupaten Puhuwato. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 5(9): 55-67.
- Dewi, K. P., dan A. W. S. Gama. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum dan Setelah Diswamitrakan PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Denpasar. Juima, 4(2): 105-109.
- Djarwanto. 2001. Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan. BPFE, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2016. BUM Desa dan Koperasi. Online pada: <http://www.berdesa.com/sutoro-eko-bum-desa-dan-koperasi>. [Diakses pada: 4 Maret 2019].
- Fahmi, I. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Alfabeta, Bandung.
- Fahmi, I. 2013. Pengantar Pasar Modal. Edisi 1. Alfabeta, Bandung.
- Gitman, L. J. 2003. *Principles of Managerial Finance* (9th ed). Pearson Education Limited, Pearson.
- Hanafi M, dan Halim A. 2014. Analisis Laporan Keuangan, Edisi ke 4. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Harahap, S. S. 2004. Teori Akuntansi, Edisi Revisi Cetakan Kesepuluh. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, S. S. 2009. Teori Kritis Atas Laporan Keuangan. Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, S. S. 2011. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasim, F. 2018. Analisis Kinerja Keuangan dan Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Pekanbaru. [Tidak Dipublikasi].
- Hoetomo. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Mitra Pelajar, Surabaya.
- HR. Abu Daud No. 3383 dan Al-Hakim No.2322
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan. Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Tentang Laporan Arus Kas. (Revisi 2009). Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Salemba Empat, Jakarta.
- Kantor Desa Bukit Intan Makmur. 2019. Monografi Desa Bukit Intan Makmur Tahun 2019. Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam.
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaunang, A. F. 2013. Pedoman Audit Internal: Petunjuk Praktis Bagi Para Auditor Internal. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Kieso, D. E., J. J. Weygandt, dan T. D. Warfield. 2012. Akuntansi Intermediete (Terjemahan Emil Salim), Edisi 12 Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah. Kencana, Jakarta.
- Maryunani. 2008. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Pustaka Setia, Bandung.
- Mudjiyanti, R. dan E. Rachmawati. 2014. Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Syariah di Purwokerto Barat. Proceeding Seminar Hasil Penelitian LPPM 2014, pada 6 September 2014.
- Munawir. 2014. Analisa Laporan Keuangan, Edisi ke 4. Liberty, Yogyakarta.

- Murhadi, W. R. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham. Salemba Empat, Jakarta.
- Noor, A. 2013. Manajemen Event. Alfabeta, Bandung.
- PKDSP [Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan] Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN), Jakarta.
- Praya, L. G. A. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pimjan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Insani Wonosari Tahun 2013-2015. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.
- Putra, I. K. C. 2017. Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Hukum Udayana, 6(1): 1-12.
- Rahayu, S. 2014. Analisis Kinerja Keuangan pada KUD Sumber Makmur Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Permana, 6(1): 19-28.
- Reeves, J. M., C. S. Warren, dan J. E. Duchac. 2014. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, Buku 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Rozi, R. F. 2018. Analisis Kinerja Keuangan dan Manfaat Ekonomi Langsung Koperasi Usaha Maju di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Pekanbaru. [Tidak Dipublikasikan].
- Sathyamoorthi, C. R., C. J. Mbekomize, I. Radikoko, dan W. Wally-dima. 2016. *Analysis of Financial Performance of Selected Savings and Credits Co-Operative Societies in Bostwana*. International Journal of Economics and Finance, 8(8): 180-193.
- Sawir, A. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Seyadi. 2003. Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. UPP STM YKPN, Yogyakarta.
- Siregar, S. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS. Kencana, Jakarta.
- Sodikin dan Riyono. 2014. Akuntansi Pengantar I. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

- Soekartawi. 2000. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarso, S. R. 2005. Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Sucipto. 2003. Penilaian Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sutrisno. 2009. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Suwandi, I. 2005. Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial. Edisi Kelima. Bharata Karya Aksara, Jakarta.
- Tumarjiyanto dan Salman. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi: Studi Kasus pada KUD Manunggal Abadi di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Jurnal Dinamika Pertanian, 29(1): 57-68.
- Undang-Undang No. 12. 1967. Perkoperasian Indonesia: Dep Kop dan PPKM. Jakarta.
- Undang-Undang No. 25. 1992. Perkoperasian Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang No. 32. 2004. Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang No. 6. 2014. Desa. Jakarta.
- Wursanto. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Andi, Yogyakarta.